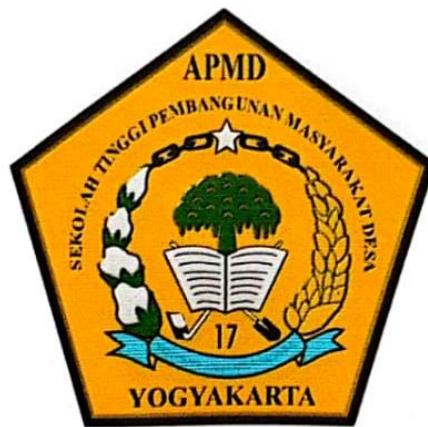


KOLABORASI MODAL POLITIK PEMERINTAH KALURAHAN DAN
MODAL SOSIAL MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BADAN
USAHA MILIK KALURAHAN DI KALURAHAN WILADEG, KAPANEWON
KARANGMOJO, KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:
LISA SILVIA
20520046

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA

2024



**KOLABORASI MODAL POLITIK PEMERINTAH KALURAHAN DAN
MODAL SOSIAL MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BADAN
USAHA MILIK KALURAHAN DI KALURAHAN WILADEG,
KAPANEWON KARANGMOJO, KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Lisa Silvia

20520046

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STARTA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta:

Hari : Jumat
Tanggal : 5 Juli 2024
Jam : 11.00 WIB
Tempat : Ruangan Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Lisa Silvia
Nim : 20520046
Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

Saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Kolaborasi Modal Politik Pemerintah Kalurahan dan Modal Sosial Masyarakat dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul" merupakan hasil kerja, usaha dan karya saya sendiri. Setiap sumber yang saya kutip maupun diambil saya nyatakan benar dan sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi akademis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya berkomitmen untuk selalu menjaga integritas akademik dan menghargai karya serta pemikiran orang lain dengan sebaik-baiknya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Yogyakarta, 24 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan



Lisa Silvia

20520046

MOTTO

“Gagal hanya terjadi jika kita menyerah”

-B. J. Habibie

“Masa depan ditentukan oleh tindakan yang kita ambil pada saat ini”

-Mahatma Gandhi

“Ubahlah hidupmu dari hari ini jangan pernah bertaruh pada masa depan, kamu harus bertindak sekarang tanpa menunda-nunda”

-Simone De Beauvoir

“Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu juga”

-QS Al-Baqarah:152

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada Ayah saya Amat Subandi terima kasih sudah berjuang untuk kehidupan saya, meskipun beliau tidak sempat merasakan pendidikan sampai dibangku perkuliahan. Namun, beliau dengan gigih mendidik saya, memotivasi, dan memberikan dukungan tiada henti kepada saya dalam setiap langkah perjalanan pendidikan hingga saya mampu menyelesaikan studi sampai tingkat sarjana.
2. Kepada Ibu saya Maimunah terima kasih atas doa, dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang tak terhingga yang telah beliau berikan sepanjang perjalanan hidup saya. Keberadaan beliau selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi saya dalam menghadapi segala tantangan, hingga saya mampu menyelesaikan studi sampai tingkat sarjana.
3. Kepada sahabat saya Tim Gabut yang tidak bisa saya sebut satu persatu terima kasih sudah menjadi sahabat setia yang telah bersama-sama melewati setiap dinamika masa perkuliahan. Setiap percakapan, setiap tangisan, setiap tawa canda semuanya membentuk momen yang selalu diingat.

Dukungan, semangat, dan kebersamaan yang kita bagikan menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi saya.

4. Kepada para senior angkatan terima kasih atas arahan, dukungan, dan inspirasi yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Kalian menjadi contoh teladan yang telah memberikan bimbingan dan nasihat dalam membantu kami menghadapi berbagai rintangan dilingkungan akademis.
5. Kepada Apri Triyanto terima kasih telah menjadi sosok pendamping setia dalam segala hal dan selalu menjadi support system, yang telah meluangkan waktunya, menemani, mendukung bahkan menghibur dalam kesedihan, serta memberi semangat selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Penulis skripsi ini, yaitu diri saya sendiri, Lisa Silvia. Terima kasih telah hadir di dunia dan bertahan sejauh ini, melewati banyak rintangan hidup yang tak terduga. Terima kasih telah memilih untuk terus hidup dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walaupun seringkali merasa putus asa dengan usaha yang belum tercapai. Namun, terima kasih telah menjadi sosok yang gigih, tangguh dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantang hidup. Kamu Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah, meskipun proses penyusunan skripsi ini penuh dengan rintangan dan tantangan. saya berusaha keras untuk menyelesaikan dengan sungguh-sungguh dan berharap dapat menyelesaikan hasil karya terbaik. Terima kasih kepada diriku sendiri atas kesetiaan dan komitmen yang diusahakan. Kamu hebat karena mampu menyusun skripsi ini dengan baik, berbahagialah selalu dimanapun kamu berada.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kolaborasi Modal Politik Pemerintah Kalurahan dan Modal Sosial Masyarakat dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul” dengan baik.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dalam mengkaji permasalahan dan kurangnya bahan bacaan. Namun, skripsi ini merupakan hasil kerja keras yang telah saya lakukan, walaupun dihadapkan dengan berbagai hambatan dan tantangan selama proses penyusunan. Saya berharap mendapatkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk perbaikan tulisan dan penelitian selanjutnya. Meskipun demikian, saya bersyukur karena melalui penulisan skripsi ini, saya memperoleh banyak pengalaman berharga yang dapat diambil dan dipelajari.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.P., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
3. Ibu Utami Sulistiana, S.P., M.P selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan tulus membantu, membimbing, dan mengarahkan saya dalam

penulisan skripsi ini sehingga saya dapat melaksanakan ujian dengan baik sebagai akhir dari masa perkuliahan.

4. Dosen Pengaji Skripsi yaitu Bapak Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat dan Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si.
5. Pemerintah Kalurahan Wiladeg dan masyarakat yang telah menerima saya untuk melakukan penelitian selama kurang lebih dua bulan.
6. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, yang telah menjadi tempat saya menimba ilmu dan berkembang.
7. Kepada teman-teman angkatan 2020 Prodi Ilmu Pemerintahan, terima kasih atas setiap momen berharga yang dilewati bersama selama masa perkuliahan ini dan telah menjadi bagian yang tek terpisahkan dari perjalanan pendidikan saya. Setiap diskusi maupun setiap tantangan yang telah dilewati bersama membentuk kenangan yang tak terlupakan.

Semoga karya saya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi inspirasi bagi siapa saja yang membacanya.

Yogyakarta, 24 Juni 2024

Penyusun

Lisa Silvia

20520046

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR BAGAN | xiii |
| INTISARI..... | xiv |
| <i>ABSTRACT</i> | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 10 |
| C. Rumusan Masalah | 10 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 11 |
| F. <i>Literatur Review</i> | 12 |
| G. Kerangka Konseptual | 20 |
| H. Metode Penelitian..... | 38 |
| BAB II PROFIL KALURAHAN WILADEG DAN BUMKAL | 47 |

| | |
|---|-----|
| A. Sejarah Kalurahan Wiladeg | 47 |
| B. Visi dan Misi Kalurahan Wiladeg | 48 |
| C. Strategi Kebijakan | 49 |
| D. Kondisi Geografi | 54 |
| E. Kondisi Demografi | 55 |
| F. Pemerintahan | 60 |
| G. Struktur Badan Permusyawaratan Kalurahan..... | 61 |
| H. Profil BUM Kal Gemilang | 63 |
| BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN | 74 |
| A. Relasi Pemerintah Kalurahan Dalam Mendukung Pengembangan BUM Kal | 75 |
| B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan BUM Kal..... | 88 |
| C. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Pengembangan BUM Kal | 97 |
| BAB IV <u>KESIMPULAN DAN SARAN</u> | 109 |
| A. Kesimpulan..... | 109 |
| B. Saran | 111 |
| DAFTAR PUSTAKA | 113 |
| LAMPIRAN | 117 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Daftar Informan Penelitian..... | 40 |
| Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kalurahan Wiladeg | 55 |
| Tabel 2.3 Mata Pencarian Kalurahan Wiladeg | 56 |
| Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan | 57 |
| Tabel 2.5 Kepercayaan Masyarakat Kalurahan Wiladeg | 59 |
| Tabel 2.6 Data Personil Pemerintahan Kalurahan Wiladeg | 61 |
| Tabel 2.7 Data Personil BPKal | 63 |
| Tabel 2.8 Data Pengurus BUM Kal Gmilang | 65 |
| Tabel 2.9 Penyertaan Modal | 66 |
| Tabel 2.10 Potensi BUM Kal Gmilang | 66 |
| Tabel 2.11 Rencana Program Kerja (RPK)..... | 68 |
| Tabel 2.12 APBKal Tahun 2024 Kalurahan Wiladeg..... | 70 |
| Tabel 2.13 Perkiraan Perhitungan Keuntungan Usaha | 71 |
| Tabel 2.14 Keuntungan Yang Diambil | 71 |

DAFTAR BAGAN

| | |
|--|----|
| Bagan 2.1 Struktur Pemerintahan Kalurahan Wiladeg | 60 |
| Bagan 2.2 Struktur Badan Permusyawaratan Kalurahan | 62 |
| Bagan 2.3 Struktur Organisasi BUM Kal Gemilang..... | 65 |

INTISARI

Penelitian ini mengkaji mengenai kolaborasi modal politik Pemerintah Kalurahan dan modal sosial masyarakat dalam pengembangan BUM Kal di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Dengan perspektif *Governance* yang menekankan pada kerja sama antara Pemerintah Kalurahan, masyarakat dan swasta dalam mendukung pengembangan BUM Kal. Masalah dalam penelitian ini terkait bagaimana kolaborasi ini mendukung pengembangan BUM Kal di Kalurahan Wiladeg. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana modal politik Pemerintah dan modal sosial masyarakat dalam mendukung pengembangan BUM Kal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan kolaborasi terjalin melalui dukungan finansial dan kebijakan, namun implementasi kebijakan ini belum efektif. Dukungan pemerintah terbatas pada regulasi dan pendanaan awal tanpa tindakan konkret lebih lanjut. Partisipasi masyarakat terlihat dalam gagasan berupa ide dalam menjalankan usaha apa yang harus dijalankan, Namun hal tersebut belum diimplementasikan secara efektif. Dan Rencana Program Kerja (RPK) diidentifikasi sebagai dasar dalam mengatasi masalah pengembangan BUM Kal. Keberhasilan pengembangan bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan serta implementasi kebijakan yang efektif.

Kata Kunci: Kolaborasi, *Governace*, Modal Politik, Modal Sosial, BUM Kal, dan Pengembangan

ABSTRACT

This research examines the collaboration of the political capital of the village government and the social capital of the community in the development of BUM Kal in Wiladeg Village, Kapanewon Karangmojo, Gunungkidul Regency. With a governance perspective that emphasises cooperation between the local government and the community as well as policy implementation at the local level. The problem in this research is related to how this collaboration supports the development of BUM Kal in Kalurahan Wiladeg. The purpose of this research is to see how the political capital of the Government and the social capital of the community in supporting the development of BUM Kal. This research used explorative qualitative method. Data collection techniques included observation, interview, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing or verification. The results showed that collaboration was established through financial and policy support, but the implementation of this policy has not been effective. Government support is limited to regulations and initial funding without further concrete action. Community participation is seen in business ideas but has not been implemented effectively due to a lack of coordination. A Work Programme Plan (RPK) was identified as the basis for addressing the development issues of BUM Kal. Successful development relies on close collaboration between government, community and stakeholders and effective policy implementation.

Keywords: Collaboration, Governance, Political Capital, Social Capital, BUM Kal, and Development.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan karakteristik kepulauan, yang mana setiap daerah memiliki potensi yang beragam termasuk sumber daya laut, pertanian, dan lainnya. Namun, luasnya wilayah dan keragaman potensi ini sering kali menyulitkan pemerintah pusat dalam mengelola dan mengoptimalkan perkembangan di setiap daerah. Untuk mengatasi tantangan ini, diterapkan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan, termasuk dalam pengembangan potensi lokal. Desentralisasi ini bertujuan untuk memberdayakan pemerintah daerah, memungkinkan mereka untuk mengelola dan memaksimalkan peluang yang ada di wilayah masing-masing secara lebih efektif. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan setiap wilayah dapat lebih mandiri dan responsif terhadap kebutuhan serta potensi lokal, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efisien dan merata di seluruh penjuru negeri.

Pengembangan desa melibatkan pengelolaan sumber daya yang ada di desa, dengan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya ini. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mengembangkan desa. Proses pengembangan desa tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup desa, tetapi juga untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap desa. Potensi desa mencakup berbagai

sumber daya, baik itu sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA). Keberadaan potensi tersebut dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh desa untuk meningkatkan kesejahteraan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sekarang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus pemerintahan dan kepentingan lokal. Kewenangan tersebut didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisi yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan adanya Undang-Undang tentang Desa, memberikan dasar hukum yang kokoh bagi desa untuk menjalankan otonomi dalam mengelola pemerintahan dan kepentingan lokalnya. Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa desa diakui sebagai entitas masyarakat hukum dengan batas wilayah yang jelas. Hal ini menyatakan bahwa desa memiliki kedaulatan terbatas yang diakui negara, sehingga memungkinkan desa untuk dapat mengatur pemerintahan secara mandiri berdasarkan inisiatif masyarakat, Hak Asal Usul, dan tradisi yang ada.

Peran pemerintah dalam pengembangan potensi desa memiliki peran signifikansi yang besar, yang mana pemerintah berfungsi sebagai pengarah dan wadah bagi masyarakat. Tanpa kehadiran pemerintah, masyarakat mungkin tidak menyadari potensi yang dimiliki oleh desa karena keterbatasan pengetahuan. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat

esensial dalam upaya pengembangan potensi desa, salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal). Pembentukan BUM Kal merupakan langkah konkret untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, serta memberikan kemandirian pada desa dengan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat atau daerah.

Kehadiran Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) diharapkan mampu meningkatkan potensi desa secara menyeluruh sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa. BUM Kal juga diharapkan mampu mengoptimalkan pengembangan potensi yang dimiliki desa. Sebagai lembaga usaha yang dikelola secara sinergis oleh Pemerintah Desa dan masyarakat, dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi lokal melalui BUM Kal (Heru Irianto, 2022).

Dengan demikian, pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dikalurahan. Dengan pengelolaan yang sinergis antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat kalurahan, BUM Kal tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melainkan dapat memberdayakan potensi lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha kalurahan harus sesuai dengan kebutuhan spesifik dan potensi yang ada dikalurahan. Kehadiran BUM Kal diharapkan menjadi penggerak utama dalam mengoptimalkan sumber daya lokal yang sebelumnya mungkin kurang bermanfaat. Dengan demikian, BUM Kal dapat menciptakan

lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat kalurahan, serta mendorong kemandirian ekonomi kalurahan.

Upaya pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) merupakan strategi Pemerintah Kalurahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. BUM Kal diharakan mampu untuk menjadi alat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa maupun kalurahan secara kolektif. Keberhasilan pengembangan BUM Kal sangat bergantung pada partisipasi dari Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat. Oleh karena itu, peran serta dalam pengelolaan BUM Kal sebaiknya melibatkan tiga pihak utama yaitu pemerintah, sektor swasta, dan kelompok masyarakat sipil (Juwita Hayyuning Prastiwi, 2022).

Disatu sisi, Pemerintah Kalurahan memiliki peran penting dalam pengembangan BUM Kal, terutama melalui modal politik yang mencakup wewenang, legitimasi, dan juga anggaran. Modal politik ini memberikan dasar yang kuat bagi Pemerintah Kalurahan untuk dapat mendukung inisiatif ekonomi lokal dan memperkuat kapasitas BUM Kal. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 tentang desa, Pemerintah Desa yang dipimpin oleh kepala desa bersama perangkat desa memiliki fungsi sebagai pelaksana utama dalam urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Peran ini tidak hanya sebatas pengelolaan administrasi tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan yang mendorong pembangunan ekonomi lokal. Dengan wewenang dan sumber daya yang dimilikinya, Pemerintah Kalurahan dapat mengarahkan BUM Kal menuju pencapaian tujuan pembangunan

berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mia Hardiani, 2023).

Di sisi lain, masyarakat kalurahan juga mempunyai modal sosial berupa kepercayaan, jaringan, dan norma yang dapat diamnaftakan untuk membangun solidaritas dan kerja sama dalam pengelolaan BUM Kal. Modal sosial ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan partisipatif, yang memungkinkan BUM Kal beroperasi secara efektif dan efisien. Dengan sinergi antara modal politik dari Pemerintah dan modal sosial dari masyarakat, BUM Kal dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan serta berkontribusi singnifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kalurahan.

Menurut Putnam (1993:167) dalam jurnal Syafar (2017), menjelaskan bahwa modal sosial merupakan kumpulan nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi kerja sama aktif dan terkoordinasi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan mereka. Ketika masyarakat mengutamakan kerja sama yang didorong dengan adanya norma-norma hal ini akan mendorong partisipasi, serta memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi satu sama lainya. Hal ini akan memperkuat struktur kerja BUM Kal dan mempermudah dalam mencapai tujuan bersama.

Modal sosial dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan BUM Kal, mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi lokal, serta memperkuat hubungan solidaritas dan kolaborasi di antara anggota masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan dan pengembangan BUM Kal tidak hanya terkait dengan aspek teknis atau

kelembagaan. Oleh karena itu, langkah utama untuk membangun BUM Kal perlu mempertimbangkan serta memanfaatkan modal sosial yang ada.

Menurut Holzer *et al.*, (2012) dalam jurnal Arrozaaq (2016), menyatakan bahwa kolaborasi atau *collaborativ governance* adalah situasi yang mana pemerintah dan sektor swasta berkerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang menguntungkan masyarakat. Melalui kerja sama tersebut dalam konteks pengembangan, kolaborasi ini menjadi kunci karena BUM Kal dapat berperan sebagai alat untuk menjalin kerja sama antara Pemerintah Kalurahan dan pelaku swasta untuk meningkatkan perekonomian kalurahan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan adanya kemitraan antara Pemerintah Kalurahan dan sektor swasta, BUM Kal memiliki potensi untuk memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang dimiliki masing-masing entitas untuk menciptakan peluang ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kalurahan. Dalam konteks ini, kolaborasi dapat menjadi dasar bagi BUM Kal dalam merencanakan dan melaksanakan program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara menyeluruh, serta memperkuat kemitraan startegis antara sektor publik dan swasta dalam upaya pembangunan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif yang diajukan oleh Holzer *et al.*,(2012) memiliki relevansi yang besar dalam konteks pengembangan BUM Kal. Yang mana sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dapat meningkatkan potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kalurahan.

Salah satu wilayah yang memiliki Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) adalah Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. BUM Kal tersebut telah berdiri sejak tahun 2019 dengan berbagai unit usaha yang bergerak dalam bidang penampungan, penjernian dan penyaluran air minum, perdagangan eceran yang terdiri dari makanan, minuman, tembakau, perdagangan besar padi dan palawija, aktivitas fotokopi, penyediaan dokumen serta aktivitas khusus penunjang kantor dan sewa. Inisiatif ini berasal dari Pemerintah Kalurahan untuk mengembangkan kalurahan mereka, dengan harapan bahwa BUM Kal di Kalurahan Wiladeg digunakan sebagai sarana untuk mendorong kemajuan dan pembangunan desa.

Namun, hingga kini, BUM Kal Gemilang di Kalurahan Wiladeg belum beroperasi atau mengalami kevakuman yang cukup lama. Berdasarkan informasi dari Pemerintah Kalurahan, kevakuman ini disebabkan oleh beberapa kendala dalam manajemen operasional. Salah satu tantangan adalah kurangnya tenaga kerja yang memiliki kualifikasi untuk mengelola unit usaha, kendala dana yang terbatas, masalah perizinan dan kesulitan dalam menentukan jenis usaha yang akan dijalankan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penggalangan dana dari berbagai sumber, penyederhanaan proses perizinan, serta analisis pasar untuk menentukan jenis usaha yang potensial dan sesuai dengan kebutuhan lokal. dengan langkah-langkah ini, diharapkan BUM Kal Gemilang di

Kalurahan Wiladeg dapat berfungsi optimal dan berkontribusi nyata terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kalurahan Wiladeg harus berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki melalui pengelolaan badan usaha. Tujuan dari langkah ialah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli desa. hal ini didasari oleh potensi yang dimiliki oleh kalurahan sendiri yang mana keadaan lokasi startegis yakni menghubungkan luar kota, luar provinsi serta terdapat beberapa sekolah, dan kantor disekitaran Kalurahan Wiladeg yang dapat memberi dampak positif pada kalurahan maupun BUM Kal itu sendiri.

Keberadaan ini bisa dimanfaatkan dengan mendirikan *rest area*, yang dilengkapi dengan fasilitas seperti toilet umum dan toko kelontong, sehingga dapat menarik pengunjung untuk membeli ataupun hanya untuk beristirahat, hal ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap penjualan berbagai barang di unit usaha tersebut. Selain itu, sebagian besar penduduk di Kalurahan Wiladeg adalah bermata pencarian sebagai petani dengan memiliki lahan yang cukup luas, mereka menanam tanaman musiman seperti padi dan palawija, serta tanaman tahunan seperti buah-buahan. Jika BUM Kal berkerja sama dengan sektor pertanian, maka hasil pertanian dapat dipasarkan secara efektif. Mengingat Kalurahan Wiladeg belum memiliki pasar, pendirian pasar lokal bisa menjadi solusi untuk menjual hasil pertanian tersebut.

Pentingnya peran Pemerintah Kalurahan dalam mendukung pengelolaan potensi kalurahan, koordinasi yang lebih baik antara pemerintah desa,

masyarakat setempat, dan pihak terkait dapat membantu mengatasi beberapa kendala yang dihadapi. Dengan merumuskan rencana pengembangan jangka panjang yang cermat, diharapkan Kalurahan Wiladeg dapat mengatasi kendala-kendala tersebut dan mengarahkan unit usahanya menuju keberhasilan jangka panjang yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat desa.

Keterlibatan aktif Pemerintah Kalurahan dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mengembangkan potensi desa. Hal ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi yang positif, tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan potensi desa tidak hanya bersifat sesaat dan ditinggalkan begitu saja. Dalam konteks ini, pentingnya peran pemerintah dan partisipasi masyarakat sebagai upaya bersama dalam memanfaatkan potensi yang ada untuk keberlanjutan dan kesejahteraan bersama menjadi sangat nyata.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian di Kalurahan Wiladeg untuk memahami lebih dalam mengenai peran Pemerintah Kalurahan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan BUM Kal Gemilang. Penelitian ini bertujuan agar BUM Kal Gemilang dapat menjalankan kembali perannya secara berkelanjutan yang dapat memberikan dampak positif bagi kalurahan dan masyarakat setempat. Serta untuk meneliti mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kevakuman operasional BUM Kal tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Kolaborasi Modal Politik Pemerintah Kalurahan dan Modal Sosial Masyarakat dalam Pengembangan Badan Usaha Millik

Kalurahan di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul”.

Penelitian ini akan mengarah pada salah satu Perspektif 5G Mazhab Timoho Ilmu Pemerintahan, yaitu Perspektif *Governance*. Perspektif *Governance* merupakan pendekatan yang berkaitan dengan relasi pemerintah dengan pemerintah desa dan masyarakat, yang meliputi aspek mengelola entitas seperti pemerintahan, organisasi, dan lembaga. Perspektif *Governance* ini mencakup struktur, proses, presedur, dan kebijakan yang digunakan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dengan cara transparan, akuntabel, adil, dan efektif.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, ruang lingkup penelitian disesuaikan dengan judul yang diangkat. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada:

1. Relasi Pemerintah Kalurahan dalam Mendukung Pengembangan BUM Kal.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan BUM Kal.
3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pengembangan BUM Kal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat ditarik rumusan masalah yakni Bagaimana Kolaborasi Modal Politik Pemerintah Kalurahan dan Modal Sosial Masyarakat dalam Pengembangan

Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplanasi Kolaborasi Modal Politik Pemerintah Kalurahan dan Modal Sosial Masyarakat dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

E. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yang penting dalam memahami kolaborasi antara modal politik pemerintah kalurahan dan modal sosial masyarakat dalam konteks pengembangan BUM Kal. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana interaksi antara kedua jenis modal ini dapat mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan BUM Kal. Dengan menganalisis peran modal sosial dalam memfasilitasi keterlibatan masyarakat serta dampak dari dukungan politik pemerintah, penelitian ini tidak hanya memperluas literatur tentang kolaborasi lokal tetapi juga memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi untuk memperkuat inisiatif ekonomi partisipatif di tingkat kalurahan.

2. Manfaat parktis

secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menguatkan kapasitas Pemerintah Kalurahan untuk dapat mengelola dan mendukung BUM Kal melalui kolaborasi yang efektif antara modal politik pemerintah dan modal sosial masyarakat, yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi lokal serta memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan di Kalurahan Wiladeg.

F. Literatur Review

Literatur review merupakan gambaran yang mencakup beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini, yaitu Kolaborasi Modal Politik Pemerintah Kalurahan dan Modal Sosial Masyarakat dalam pengembangan BUM Kal. Beberapa studi terdahulu yang relevan untuk digunakan, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kamelia Yanisma Tesi Janar dengan judul Kolaborasi Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Kebun Teh Nglinggo. Menjelaskan bahwa dengan adanya Objek wisata Tebun Teh Nglinggo dapat meningkatkan pendapatan para petani teh tradisional. dan bukan hanya mendapatkan penghasilan dari hasil daun teh akan tetapi mendapatkan penghasilan dari wisatawan yang datang berkunjung diwisata tersebut. Dalam skripsi tersebut menyoroti pengelolaan Objek Wisata Teh Nglinggo menunjukkan adanya ketidak simbang dalam manfaat yang diperoleh

oleh kalurahan pangerharjo sebagai subjek pembangunan. Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo cenderung tidak mengintegrasikan dalam pengelolaan Objek Wisata Teh Nglinggo tersebut, yang berdampak pada kurangnya kontribusi terhadap pendapatan Asli Kalurahan (PAKal). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Upaya yang dilakukan Oleh Pemerintah yakni lebih berfokuskan pada komunikasi dengan masyarakat, termasuk dengan memberikan sosialisasi mengenai potensi wisata yang ada di Kalurahan Pagerharjo.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Paskalis Smaillindo Darmawan, dengan judul Dinamika Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menunjukkan bahwa terdapat empat unit usaha yaitu Unit Usaha Kuliner Sekar Mataram, Unit Usaha Kangen Water (air galon), Unit Usaha Pengelolaan Sampah dan Unit Usaha Wisata Edukasi. Namun, dari keempat unit tersebut hanya dua unit usaha yakni Unit Usaha Kuliner Sekar Mataram, Unit Usaha Kangen Water (air galon). Yang mana BUM Desa ini mengalami kendala terkait manajemen dalam operasionalnya seperti kesulitan dalam memberi gaji karyawan, suplai bahan baku dan perawatan tempat. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Temuan dalam skripsi ialah menyoroti bahwa dalam pengembangan BUM Desa Bangunjiwo perlu dilakukan secara partisipatif. Peneliti menjelaskan bahwa partisipatif

masyarakat adalah salah satu faktor utama dalam memperngaruhi keberhasilan suatu program.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Susana Sinar dengan judul Pengelolaan *Common Pool Resources*: Mencari Titik Temu Antara Modal Sosial dan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Bambing Opak Asri di Kalurahan Canden. Menjelaskan bahwa di Kalurahan Canden terdapat sumber daya bersama berupa sungai yang telah dijadikan destinasi wisata bernama Bambing Opak Asri. Destinasi wisata ini merupakan hasil dari transformasi modal sosial masyarakat Padukuhan Canden menjadi modal ekonomi. Modal sosial tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan wisata yang memberikan manfaat ekonomi bagi sebagian masyarakat setempat. Namun, pengelolaan *common pool resources* ini hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat Padukuhan Canden, tidak melibatkan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kalurahan perlu memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan untuk mengatur secara lebih terstruktur pengelolaan wisata ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Rahmadanti, Dengan Judul Peran Pemerintah Kalurahan Dalam Mengembangkan BUM Kal (Badan Usaha Milik Kalurahan) “Gerbang Merpati” Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman Tahun 2021-2022. Menjelaskan bahwa di Kalurahan Girikerto terdapat BUM Desa Gerbang Mepati. BUM Desa tersebut adalah salah satu BUM Desa yang ada di Sleman

pada tahun 2014. Dan sejak tahun 2020 BUM Desa tersebut diganti dengan nama BUM Kal (Badan Usaha Milik Kalurahan). Bergerak pada unit usaha pembayaran listrik dan ekowisata pancoh. Namun, dalam operasionalnya mengalami kendala terutama dalam hal pemberdayaan manusia, modal, dan keadaan pandemic covid. Oleh sebab itu peran Pemerintah Kalurahan dalam mengembangkan BUM Kal Gerbang Merpati sangat penting untuk dapat mempertahankan BUM Kal agar tetap berjalan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Fredy Kurniawan, Dengan judul “Ambivalensi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata: Perspektif *Governing*” penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan potensi-potensi desa dapat ditingkatkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui kedua bidang usaha ini, pengembangan potensi desa dapat diarahkan melalui kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa di Kalurahan Sriharjo, terdapat berbagai masalah, terutama kemiskinan, meskipun kalurahan ini memiliki potensi seni budaya, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Oleh karena itu, potensi yang ada mulai dikembangkan, dengan Pemerintah Kalurahan Sriharjo mengalokasikan dana desa untuk pembangunan desa wisata. Namun, pengelolaan dan pengembangan ini dilakukan berdasarkan inisiatif masyarakat di setiap padukuhan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Aji, Andika Alam Nugrahaa dan Juhari Sasminto, 2021 dengan Judul “Partisipasi Masyarakat dalam Perkembangan Badan Usaha Milik Desa: Studi Kasus Desa Penggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020” menunjukkan bahwa BUM Desa Panggung Lestari di Kalurahan Penggungharjo, didirikan sejak tahun 2013, berhasil meningkatkan modal hingga sembilan kali lipat dari modal awal yang diberikan oleh desa. Salah satu program unggulan adalah Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (KUPAS), yang merupakan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan oleh BUM Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat kalurahan dalam pengembangan BUM Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat kalurahan yang menerima manfaat dari BUM Desa Panggung Lestari cukup baik dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil program. Namun demikian, terdapat kekurangan dalam efektivitas perencanaan serta monitoring evaluasi.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Raharjo, dan Pamuji 2022, Dengan judul “Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal di Desa Tepus, Kabupaten Gunungkidul” pada jurnal Ilmu Sosial Vol. 1, No. 11, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi potensi pariwisata Kalurahan Tepus. Aparatur pemerintahan serta pengurus kelompok sadar wisata Kalurahan Tepus menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi strategi pengembangan wisata berbasis kearifan

lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan SWOT sangat berperan dalam merumuskan strategi pengembangan wisata yang mengedepankan kearifan lokal di Kalurahan Tepus. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan menggunakan sumber data primer (wawancara, observasi, dan dokumentasi) serta sekunder (buku, website, dan dokumen terkait).

8. Penelitian yang dilakukan oleh Legowo, Ayu Mega Diarti and Martinus 2021 Dengan judul “Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan BUM Desa Se-Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik” penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat partisipasi masyarakat dan pengembangan BUM Desa. Hasil analisis regresi linier menunjukkan koefisien sebesar 0,840, yang mengindikasikan adanya pengaruh positif yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Artinya, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin baik pengembangan BUM Desa yang dapat dicapai. Sebaliknya, jika tingkat partisipasi masyarakat rendah, maka potensi pengembangan BUM Desa juga akan menurun. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan eksplanatif, yang menggali hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Khairulyadi, dan Zulfadhl 2021, Dengan judul “Modal Sosial dalam Pengelolaan BUMG di Gampong Trieng Gadeng, Aceh Timur” penelitian ini menyoroti bahwa modal sosial merupakan faktor kunci dalam mendukung proses pemberdayaan

masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua tipe modal sosial yang berperan dalam pengelolaan BUMG, yaitu bounding dan linking. Kedua tipe modal sosial ini didukung oleh peran pak geuchik sebagai aktor utama yang berhasil memaksimalkan unsur modal sosial, seperti membangun kepercayaan antara berbagai pihak dan memperluas jaringan sosial. Dengan demikian, modal sosial memiliki peran krusial dalam memfasilitasi kerjasama antara pemerintah, pengelola BUMG, dan masyarakat dalam mencapai kesuksesan program-program yang dijalankan BUMG.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Anggit Henggar Jati, Nunik Retno dan Turtiantoro 2022, Dengan judul “Analisis Peran Pemerintah dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Cingkrong, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Grobogan” penelitian ini menggambarkan Desa Cingkrong sebagai salah satu desa di Kabupaten Grobogan yang telah mendirikan BUM Desa yang kreatif, inovatif, menguntungkan, dan berkelanjutan. Fokus penelitian ini adalah peran pemerintah daerah dan desa dalam proses pendirian BUM Desa, mengikuti konsep pendirian BUM Desa oleh David, yang meliputi empat inisiatif utama: inisiatif dari Pemerintah Desa, potensi desa, pengelolaan SDM BUM Desa, dan penyertaan modal. Proses ini melalui tiga tahapan, yaitu sosialisasi, musyawarah desa, dan penetapan peraturan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif

dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa Grobogan dan desa Cingkrong dalam tahapan pendirian BUM Desa sudah terlaksana, meskipun ada kekurangan dalam perekrutan SDM yang bersifat konvensional dan akses terbatas terhadap modal dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, disarankan agar proses perekrutan lebih transparan dan akuntabel, serta pemerintah daerah dapat menyediakan akses modal yang lebih jelas bagi BUM Desa.

Berdasarkan beberapa *literatur review* yang digunakan, penelitian ini menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaannya terletak pada upaya menjelaskan keterlibatan Pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam pengembangan BUM Kal sebagai peningkatan perekonomian di desa. Namun, perbedaannya terletak pada fokus yang akan di teliti, adapun fokus pada penelitian yang akan di teliti yakni Pertama, relasi Pemerintah Kalurahan dalam mendukung pengembangan BUM Kal. Kedua, partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUM Kal dan Ketiga faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan BUM. Serta dalam menganalisis fenomena yang akan terjadi tentunya menggunakan prespektif yang berbeda, dalam penelitian ini menggunakan prespektif 5G Mazab Timoho yaitu *Governance* yang melibatkan kolaborasi dengan tiga sektor yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Penelitian ini akan menganalisis kolaborasi modal politik Pemerintah Kalurahan dan modal sosial masyarakat dalam mengembangkan BUM Kal dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemimpin yang efektif harus

memiliki pengaruh yang kuat terutama dalam pengembangan BUM Kal, sebuah program pemerintah yang perlu diberdayakan untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Upaya ini menekankan pentingnya partisipasi dan prakarsa masyarakat dalam mencapai tujuan tersebut.

G. Kerangka Konseptual

1. Governance

Governance merupakan konsep yang merujuk pada pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, yang melibatkan pemerintah kalurahan, sektor swasta, dan masyarakat. adapun lima poin utama dalam *Governance* yaitu: pertama, *Governance* melibatkan berbagai institusi dan aktor. Kedua, *Governance* menunjukkan bahwa batas-batasan dan tanggung jawab yang tidak jelas dalam mengatasi isu sosial dan ekonomi. Ketiga, *Governance* menekankan adanya hubungan saling ketergantungan antara insitusi yang terlibat. Keempat, *Governance* berkaitan dengan otonomi aktor-aktor dalam mengatur diri sendiri. Dan kelima, *Governance* menyarankan bahwa perbaikan tidak harus selalu mengandalkan kekuasaan pemerintah melalui perintah dan otoritasnya (Dewi 2019).

Maka dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *Governance* merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai institusi dan aktor yang mencakup pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini menekankan pentingnya mengkarifikasi batas tanggung jawab dalam menangani masalah sosial dan ekonomi, serta menyoroti ketergantungan antara insitusi yang terlibat.

Menurut Chhotray dan Stoker (2009) dalam jurnal Subhan (2019), menyatakan bahwa konsep *Governance* dibangun atas empat, elemen yaitu: Pertama, aturan. Kedua, kolektif. Ketiga, pengambilan keputusan, dan Keempat, pemahaman bahwa tidak ada sistem control formal yang dapat secara tegas mengatur hubungan dan hasil, berikut penjelasanya:

- a. Pertama aturan artinya mengacu pada kerangka kerja hukum dan normative yang mengatur perilaku interaksi antar aktor dalam sistem *governance*.
- b. Konsep kolektif merupakan konsep yang menekankan pentingnya partisipasi dari berbagai pihak dalam pengambilan keputusan.
- c. Pengambilan keputusan menekankan bahwa dalam proses pengambilan keputusan melibatkan negosiasi dan pertimbangan berbagai kepentingan.
- d. *Governance* mengakui bahwa tidak ada sistem control formal yang dapat sepenuhnya mengatur dan mengendalikan dinamika “hubungan dan hasil” diantara berbagai pihak yang terlibat dalam *governance*. Ini menekankan fleksibilitas dan kompleksitas dalam hubungan antar aktor serta hasil yang mungkin terjadi dari interaksi.

Menurut Tony Bovaird, *Governance* merupakan himpunan aturan, struktur, dan prosedur yang memberikan sebagian kekuasaan kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk memegaruhi keputusan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka (Subhan 2019). Konsep ini mencerminkan kerangka kerja yang mengatur bagaimana kekuasaan dibagi dan digunakan di antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses

pengambilan keputusan, dengan tujuan untuk memperemosikan partisipasi yang lebih luas dan mempertimbangkan kepentingan yang beragam dalam pembuatan keputusan yang adil dan efektif.

2. Kolaborasi

Secara etimologi, *Collaborative* berasal dari dari kata *co* dan *labor* yang miliki makna sebagai penyatuan tenaga atau peningkatakan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Selanjutnya, kata kolaborasi sering kali digunakan untuk menjelaskan proses penyelesaian pekerjaan yang bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas hubungan, serta lintas organisasi bahkan lintas negara. Adapun secara terminology kolaborasi mengandung makna yang sangat umum dan luas yang mendeskripsikan adanya keadaan tentang terjadinya kerja sama antara dua orang maupun lebih yang saling memahami permasalahan masing-masing secara bersama-sama dan berusaha untuk saling membantu memecahkan permasalahan secara bersama-sama.

Dengan demikian, pada penelitian ini menggunakan konsep kolaborasi dengan prespektif *Governance* dengan tujuan menyelesaikan permasalahan yakni dengan melibatkan tiga sektor yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta. Menurut Ansell dan Gash (2008) dalam jurnal Arrozaaq (2016), mengemukakan bahwa *Collaborative Governance* merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk mengatasi suatu masalah serta menjadi alat yang efektif untuk mengahadapi masalah. Hal ini disebabkan oleh kemampuan *Collaborative Governance* dalam menciptakan kepemilikan bersama terhadap masalah yang dihadapi, serta perannya sebagai mediator untuk membantu para

pemangku kepentingan mencapai pemahaman yang sama terhadap masalah tersebut.

Menurut Ansell dan Gash Dalam buku *Collaborative Governance* berdasarkan kajian literatur, sebuah model *Collaborative Governance* dapat dirumuskan berdasarkan empat variabel utama dalam kolaboratif (Retno Sunu Astuti, 2020), model tersebut mencakup:

1) Kondisi Awal

Sebelum proses kolaborasi dimulai, kondisi awal dapat menjadi faktor pendukung atau penghambat dalam kerja sama antara pemangku kepentingan. Adapun tiga variabel dalam kondisi awal ini yaitu Pertama, ketidakseimbangan dalam pengaruh, sumber daya, dan pengetahuan antara pemangku kepentingan. Kedua, sejarah kerjasama atau konflik di masa lalu di antara mereka. Ketiga, dorongan atau hambatan dalam partisipasi dalam kolaborasi.

2) Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merupakan model yang mengacu pada aturan dasar kolaborasi, yang penting sebagai legitimasi procedural dalam proses ini. Fokus utamanya adalah aturan partisipasi, pembentukan forum, aturan pelaksanaan, dan transparan dalam pelaksanaan.

3) Kepemimpinan

Dalam kolaborasi, seringkali muncul suatu konflik maupun ketidakpercayaan tinggi diantara pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang dapat diterima dan dipercaya

sebagai mediator. Kepemimpinan yang kuat dan dihormati oleh semua pemangku kepentingan sangat penting untuk keberhasilan kolaborasi.

4) Proses Kolaborasi

Awal dari proses kolaborasi seringkali tidak mudah untuk ditentukan. Namun, secara umum proses kolaborasi mencakup lima tahapan utama yakni:

a. Dialog Tatap Muka

Semua bentuk *collaborative governance* bergantung pada “dialog langsung antara para pemangku kepentingan”. Dialog ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan juga sering digunakan untuk mengidentifikasi peluang dengan fokus pada narasi yang saling menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi.

b. Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan tidak terlepas dari dialog tatap muka. Pimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan di antara semua pemangku kepentingan. Proses ini merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan waktu dan komitmen yang tinggi.

c. Komitmen dalam Proses Kolaborasi

Ketergantungan yang tinggi antara para pemangku kepentingan dapat meningkatkan komitmen terhadap kolaborasi. Hal ini penting karena menekankan bahwa kolaborasi bukan sekedar kesepakatan

sekali jalan, melainkan sebuah proses kerja sama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

d. Pemahaman Bersama

Para pemangku kepentingan harus dapat mengembangkan pemahaman bersama tentang tujuan yang ingin dicapai. Pemahaman ini mencakup tujuan bersama dan pemecahan masalah secara kolektif.

e. Hasil Pertengahan

Kolaborasi dapat berlanjut ketika tujuan dan manfaatnya mulai dirasakan, meskipun masih dalam bentuk hasil sementara atau kecil. Keberhasilan kecil ini dapat menjadi pendorong untuk membangun kepercayaan dan komitmen yang lebih kuat di antara pemangku kepentingan.

Berdasarkan penjelasan Ansell dan Gash tersebut dapat disimpulkan, bahwa *Collaborative Governance* merupakan sebuah mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan masalah melalui penciptaan kepemilikan bersama atas masalah yang dihadapi serta sebagai mediator antara pemangku kepentingan. konsep ini mengutamakan kerjasama yang berdasarkan aturan yang jelas, kepemimpinan yang dapat dipercaya, dan proses kolaboratif yang melibatkan dialog dan membangun kepercayaan.

Para peneliti lain mendeskripsikan kolaborasi sebagai alat untuk menggabungkan perspektif yang berbeda guna mencapai solusi bersama (Arrozaaq, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman pandangan untuk menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan efektif. Di dunia yang

kompleks dan multidimensi seperti sekarang, kolaborasi yang berhasil memperlukan penyatuan perspektif dari berbagai latar belakang ataupun pengalaman. Dengan menyatukan kekuatan individu yang memiliki sudut pandang yang beragam dengan kolaborasi tersebut dapat menciptakan solusi yang holistik dan berkelanjutan untuk tantangan yang kompleks.

Emerson, Nabatci, dan Balogh (2008) dalam jurnal Denok Kurniasih (2017), menyatakan bahwa kolaborasi dalam konteks *collaborative governance* merujuk pada suatu proses dan struktur dalam pengambilan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan masyarakat secara konstruktif. Ini mencakup kerjasama antara lembaga-lembaga publik, berbagai tingkat pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sipil dengan tujuan mencapai kepentingan umum yang tidak dapat dicapai tanpa partisipasi dari semua pihak. Menurut Emerson, Nabatci, dan Balogh dalam buku *Collaborative Governance*, proses kolaborasi terdiri dari tiga elemen utama yaitu sebagai berikut:

1) Dinamika Kolaborasi

Dinamika kolaborasi melibatkan beberapa elemen kunci utama yang menentukan keberhasilan kerja sama antara berbagai pihak, yakni sebagai berikut:

a. Penerapan Prinsip Bersama

Penerapan prinsip bersama merupakan nilai dan aturan dasar yang disepakati oleh semua pihak dalam kolaborasi. Penerapan prinsip ini memastikan bahwa semua pihak memiliki pandangan yang sama tentang tujuan serta cara mencapai tujuan tersebut.

b. Motivasi Kolektif

Motivasi kolektif adalah dorongan internal yang membuat semua pihak bersemangat untuk mencapai tujuan kolaborasi. Hal ini mencakup keinginan untuk berkerja sama, saling percaya, dan melihat usaha kolaboratif.

c. Kapasitas Untuk Bertindak Bersama

Kapasitas ini mencakup sumber daya, keterampilan, dan kemampuan untuk dimiliki oleh setiap pihak untuk berkontribusi dalam kolaborasi.

2) Tindakan Kolaborasi

Tindakan dalam kolaborasi menunjukkan dinamika kolaborasi, baik dalam bentuk kegiatan, diskusi, ataupun event. Tindakan tersebut mencerminkan pemahaman yang baik tentang dinamika kolaborasi oleh para aktor. Dampaknya akan menghasilkan efek sementara yang kembali mempengaruhi dinamika kolaborasi, serta dampak jangka panjang.

3) Dampak dan Adaptasi

Dampak yang dimaksud adalah hasil sementara yang muncul selama proses kolaborasi. Dampak kolaborasi mencakup hasil yang diharapkan seperti “*small-wins*” yaitu memotivasi, serta dampak yang tidak diharapkan seperti kendala dan hambatan yang muncul pada saat proses kolaborasi. Selain itu, ada dampak yang tidak

terduga, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi jalanya proses kolaborasi.

Berdasarkan penjelasan terhadap proses kolaborasi menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh, terdapat tiga komponen inti yang menentukan keberhasilan kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu Dinamika Kolaborasi, Tindakan Kolaborasi, dan Dampak serta Adaptasi. Dinamika kolaborasi ini melibatkan implementasi prinsip kesepakatan bersama, motivasi kolektif, dan kapasitas untuk bertindak bersama yang membentuk landasan kokoh untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan tindakan kolaborasi menampilkan interaksi yang dinamis dalam akses kolaboratif yang mencerminkan pemahaman mendalam mengenai kolaborasi oleh semua pihak dan berkontribusi pada hasil sementara yang dapat mempengaruhi dinamika kolaborasi. Sementara itu, kemampuan untuk mengelola dampak dan adaptasi menjadi faktor utama dalam menghadapi tantangan dan perubahan selama proses kolaborasi.

3. Modal Sosial

Modal sosial merupakan gagasan yang menekankan bahwa dalam mengatasi masalah yang dihadapi, yang mana individu dalam masyarakat tidak dapat secara mandiri. Oleh sebab itu, pentingnya kerjasama dan kolaborasi dari seluruh anggota masyarakat yang terlibat. Hal ini, menjadi faktor utama dalam mengatasi masalah tersebut (Dollu, 2020). Modal sosial menekankan bahwa individu dalam masyarakat memerlukan bantuan serta kerjasama sesama anggota masyarakat untuk mengatasi masalah yang dihadapi, hal ini menegaskan bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan

berbagai masalah. Oleh sebab itu, penyelesaian masalah ini memerlukan partisipasi dan juga sinergi dari berbagai pihak termasuk individu, kelompok, lembaga, serta pemerintah, kerja sama ini penting dalam berbagai konteks baik dari level lokal hingga global.

Modal sosial ini dapat menguatkan solidaritas sosial dan saling ketergantungan antar anggota masyarakat, serta dapat membentuk jaringan dukungan yang meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap tekanan luar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, modal sosial merupakan konsep utama masyarakat dalam menghadapi masalah yang bersifat kompleks. Dengan adanya kerja sama kolaborasi dapat memberikan solusi yang inklusif dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Adapun modal sosial menurut Coleman (1988) pada jurnal Upadani (2017), menyatakan bahwa modal sosial merupakan sumber penting bagi individu dalam bertindak dan meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, modal sosial dapat membentuk masyarakat yang kuat dan keperibadian yang mampu mengatasi permasalahan dengan cepat tanpa ada yang dirugikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa modal sosial memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan masyarakat. Dengan modal sosial yang baik individu dapat berinteraksi dan bekerja sama lebih efektif, menciptakan jaringan kepercayaan, dan dukungan yang kuat. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup secara individu, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dalam komunitas. Namun, penting juga untuk diingat bahwa pengembangan modal sosial harus didukung oleh kebijakan yang inklusif dan partisipatif dari pemerintah serta komitmen dari seluruh

elemen masyarakat untuk menjaga dan memperkuat nilai-nilai kepercayaan dan solidaritas.

Menurut Robert D. Putnam dalam buku “Memahami Modal Sosial” yang ditulis oleh Santoso (2020), menjelaskan pentingnya modal sosial. Salah satu alasanya utamanya adalah bahwa moda sosial memfasilitasi warga negara dalam menyelesaikan masalah dengan efektif. Kedua, modal sosial berfungsi sebagai peluang untuk memudahkan kemajuan masyarakat. Ketika individu dalam masyarakat saling percaya dan terlibat dalam interaksi, transaksi sosial dan urusan sehari-hari menjadi lebih efektif dan efisien. Ketiga, memperluas pemahaman kita tentang bagaimana keterkaitan nasib kita dengan orang lain, baik itu anggota keluarga, teman, atau rekan dalam aktivitas sosial. Mereka yang aktif dalam interaksi sosial cenderung lebih toleran, mengurangi sikap sinis, dan lebih empati terhadap orang lain yang mengalami kesulitan. Sebaliknya, individu yang kurang terlibat dalam hubungan sosial cenderung mengalami kesulitan dalam menguji dan mengembangkan karakter mereka dalam interaksi sehari-hari maupun dalam forum diskusi formal. Tanpa kesempatan ini, mereka rentan terhadap kecenderungan negatif yang mungkin mempengaruhi perilaku mereka

Menurut Pierre Boudieu dalam jurnal Mbolang (2020), menyatakan bahwa modal sosial mencakup semua sumber daya baik yang aktual maupun potensial, yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang stabil hal ini didasarkan pada saling mengenal dan saling mengakui. Kesimpulan dari pandangan Pierre Bourdieu mengenai modal sosial adalah bahwa modal sosial mencakup segala sumber daya, baik yang aktual

maupun potensial, yang terhubung dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang stabil. Jaringan ini dibentuk berdasarkan prinsip saling mengenal dan juga saling mengakui.

Bourdieu juga menegaskan bahwa modal sosial tidak hanya terdiri dari asset maupun sumber daya fisik, akan tetapi mencakup hubungan dan koneksi sosial yang dapat dipercaya. Dengan adanya jaringan tersebut, dapat memungkinkan individu mengakses sumber daya yang mungkin tidak diperoleh melalui cara lain. Modal sosial ini memiliki potensi untuk memberikan keuntungan kompetitif di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan sosial. Dengan demikian, peran modal sosial sangat signifikan dalam mencapai tujuan individu maupun kolektif, serta mendukung kerjasama dan kohesi sosial dalam masyarakat.

4. Modal Politik

Menurut Satrawati (2019), menjelaskan bahwa modal politik adalah segala bentuk sumber daya yang dimiliki oleh aktor politik, baik individu, kelompok, maupun lembaga, yang dapat digunakan untuk mempengaruhi proses politik dan kebijakan publik. Sumber daya ini bisa berupa kekuasaan, pengaruh, jaringan, reputasi, atau aset materiil seperti uang dan properti. Dengan modal politik, aktor politik dapat memperoleh, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan serta mencapai tujuan politik mereka. Komponen utama modal politik meliputi kekuasaan dan jabatan yang memberikan otoritas, jaringan dan aliansi dengan individu atau kelompok berpengaruh, reputasi dan kredibilitas yang membangun kepercayaan publik, sumber daya ekonomi yang mendukung kampanye dan kegiatan

lobi, serta pengetahuan dan informasi yang mendalam tentang proses politik dan isu-isu kebijakan. Modal politik penting karena memungkinkan aktor politik untuk mengumpulkan dukungan, membangun koalisi, serta merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan tujuan mereka.

Menurut Kadir (2014) menjelaskan bahwa modal politik dalam konteks pembangunan merujuk pada kekuatan atau keunggulan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok dalam memperngaruhi dan mengelola kebijakan publik, serta memajukan pembangunan. Hal ini meliputi kemampuan untuk memperngaruhi proses pengambilan keputusan, memperoleh akses terhadap sumber daya dan dukungan, serta menggalang dukungan untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Bersadarkan penjelasan diatas mengenai modal politik dalam konteks pembangunan menunjukkan betapa pentingnya peran modal politik dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi dan mengelola kebijakan publik sangat krusial, terutama dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak luas. Modal politik memungkinkan aktor-aktor ini untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya dan dukungan yang diperlukan, serta menggalang dukungan publik untuk inisiatif-inisiatif pembangunan. Dengan demikian, pengelolaan modal politik yang efektif dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan pembangunan, memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya bermanfaat secara jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

5. Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang sekarang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, menjelaskan bahwa BUM Desa merupakan lembaga yang didirikan dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan untuk mengoptimalkan potensi desa, kelembagaan perekonomian, dan sumber daya alam dan manusia. Oleh sebab itu, BUM Desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dari peningkatan BUM Desa setiap tahunnya (Sidik, 2020). Dengan demikian keberadaannya yang semakin berkembang setiap tahunnya, membuktikan bahwa pentingnya peran BUM Desa dalam memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan ditingkat desa. Maka BUM Desa dianggap sebagai alat yang efektif dalam memberdayakan ekonomi lokal dan menciptakan kesempatan baru bagi masyarakat desa untuk berkembang secara berkelanjutan.

Menurut Rahmawati (2020) menyatakan bahwa BUM Desa adalah Lembaga usaha didesa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah desa dengan tujuan untuk memperkuat kebutuhan dan potensi desa yang dimiliki. Artinya, BUM Desa adalah sebuah entitas ekonomi yang berfungsi untuk melakukan kegiatan usaha untuk mencapai hasil tertentu, seperti keuntungan ataupun laba. Seyadi (2003) dalam jurnal Rahmawati (2020) menjelaskan bahwa peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam meningkatkan perekonomian desa dapat diuraikan sebagai berikut:

1. BUM Desa berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat di desa.
2. BUM Desa dapat menjadi pondasi kestabilan ekonomi nasional dalam Memperkuat perekonomian rakyat.
3. Berupaya untuk menciptakan dan mengembangkan perekonomian masyarakat didesa.
4. Memberikan bantuan kepada masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Sholeh (2014), pembentukan dan pengelolaan BUM Desa harus didasarkan pada proses yang telah ditentukan secara cermat dan telah diubah sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa pembentukan dan pengelolaan tersebut sebagai berikut:

1. **Azaz Kesukarelaan**

Dalam konteks pemberdayaan melalui BUM Desa, penting untuk menekankan bahwa partisipasi individu dalam kegiatan harus bersifat sukarela, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain. Partisipasi ini muncul karena dorongan individu untuk memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

2. **Azaz Kesetaraan**

Azaz ini menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam BUM Desa memiliki posisi dan juga kedudukan yang sama. Dengan demikian, tidak ada yang dianggap lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lainnya.

3. Azaz Musyawarah

Azas musyawarah ini menegaskan bahwa setiap pihak memiliki hak untuk memberikan gagasan maupun pendapatnya secara terbuka, dan perbedaan pendapat harus saling dihargai. Pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah ini dapat mencapai tujuan mufakat.

4. Azaz Keterbukaan

Menyiratkan bahwa semua aktivitas yang dilakukan oleh BUM Desa harus bersifat transparan tanpa ada yang disembunyikan. Hal ini bertujuan agar mencegah timbulnya kecurigaan dan membangun rasa saling percaya, kejujuran serta kepedulian diantara anggota BUM Desa.

6. Pengembangan BUM Kal

Pengembangan merupakan strategi untuk memperluas pembinaan yang dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan juga peningkatan partisipasi pada program atau kegiatan terpadu yang melibatkan para pemangku kepentingan BUM Kal. Adapun berdasarkan Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 terkait Pengembangan BUM Kal yang meliputi:

- a. Pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha.
- b. Mendukung penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan industrialisasi komoditas desa melalui BUM Desa/BUM Desa bersama.

- c. Menyelenggarakan forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan untuk meningkatkan kolaborasi dan berbagi informasi.
- d. Mengadakan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha secara periodik dan berkesinambungan untuk membangun jaringan dan berbagi pengetahuan.
- e. Mengadakan temu kemitraan antar sesama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan pelaku usaha ekonomi lain untuk meningkatkan kerjasama dan sinergi.
- f. Memfasilitasi peningkatan akses permodalan untuk mendukung pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
- g. Memfasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerjasama usaha dan kerjasama non-usaha.
- h. Memfasilitasi akses dan pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan.
- i. Memfasilitasi akses BUM Desa/BUM Desa bersama kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- j. Meningkatkan akses BUM Desa/BUM Desa bersama ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional maupun internasional.
- k. Memberikan dukungan promosi produk termasuk penyediaan infrastruktur promosi.
- l. Mendukung pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi serta perluasan jangkauan pemasaran.

- m. Menyelenggarakan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital.
- n. Menyediakan program atau kegiatan pengembangan sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan merupakan strategi yang komprehensif untuk memperluas dan meningkatkan pembinaan melalui berbagai aspek. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara berbagai elemen dan aktor yang terlibat, sehingga dapat menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh komunitas. Dengan adanya Permendes PDTT No. 3 Tahun 2021 memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengembangkan potensi ekonomi desa melalui BUM Desa/BUM Desa bersama. Dengan menetapkan langkah-langkah seperti pelatihan usaha, fasilitasi akses permodalan, dan pengembangan jaringan pemasaran, peraturan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengelolaan dan daya saing BUM Desa dalam pasar yang lebih luas. Upaya-upaya ini tidak hanya membangun keberlanjutan ekonomi lokal tetapi juga mendorong kemitraan dan kolaborasi yang lebih erat antara BUM Desa dengan pemangku kepentingan ekonomi lainnya. Namun, implementasi yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat desa, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa program-program ini memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat desa.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Metodologi penelitian kualitatif seperti yang dijelaskan dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif merujuk pada jenis penelitian di mana temuan tidak diperoleh melalui prosedur statistik, tetapi melalui pemahaman dan interpretasi peneliti terhadap peristiwa, interaksi sosial, serta perilaku subjek dalam konteks tertentu (Feny Rita Fiantika, 2022).

Menurut Fadli (2021) penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan di lingkungan alami, dengan tujuan untuk memahami dan menafsirkan fenomena yang terjadi. Hal ini menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif aktivitas yang dilakukan oleh individu serta dampak dari tindakan tersebut terhadap kehidupan mereka.

Creswell (2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif eksploratif adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menggali dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau kemanusian. Pendekatan ini berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap prespektif dan pandangan subjek penelitian, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang komprehensif dan kontekstual.

Dengan demikian, penelitian kualitatif eksploratif adalah metode yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan fenomena yang

terjadi. Pendekatan ini mengandalkan pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menggambarkan peristiwa serta pengalaman hidup individu secara rinci. Data yang diperoleh yakni berupa kata-kata dan juga gambar kemudian disusun dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang subjek yang diteliti.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Unit Analisis

a. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan analisis yang mencakup pada karakteristik, nilai dari individu, dan kegiatan yang ditentukan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Dengan demikian, Objek dari penelitian ini adalah Kolaborasi Modal Politik Pemerintah Kalurahan dan Modal Sosial Masyarakat Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal).

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk kepada individu atau informan yang akan memberikan data dan informasi terkait permasalahan atau fenomena yang hendak diteliti. Dengan demikian, subjek penelitian dapat diartikan sebagai individu maupun informan yang memberikan data atau informasi relevan terkait dengan permasalahan maupun fenomena yang akan di teliti. Subjek penelitian ini berperan penting

dalam menyediakan wawasan dan juga pemahaman yang diperlukan dalam mencapai tujuan penelitian. Adapun individu yang akan dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini yakni antara lain:

Tabel 1.1 Daftar Informan Penelitian

| No | Nama Informan | Jabatan | Pendidikan | Jenis Kelamin | Usia |
|----|-------------------------|------------------------------|------------|---------------|----------|
| 1. | Kaniyo | Lurah | S1 | L | 59 Tahun |
| 2. | Nurtika Fitria Reni, ST | Carik | S1 | P | 34 Tahun |
| 3. | Magiyono | Ketua Pengurus BUM Kal | S1 | L | 54 Tahun |
| 4. | Tri Hardono | Ketua BPKal | SMA | L | 52 Tahun |
| 5. | Sumarno | Tokoh Masyarakat | SMA | L | 61 Tahun |
| 6. | Runi | Masyarakat Swasta | SMA | P | 41 Tahun |
| 7. | Emiliana | Masyarakat Swasta | SMA | P | 50 Tahun |
| 8. | Noviana | Masyarakat Kalurahan Wiladeg | SMA | P | 28 Tahun |

(Sumber: Dari Lapangan 2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa daftar informan penelitian mencakup perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat dan Pemerintahan Kalurahan. Informan ini memberikan informasi, prespektif yang komprehensif dan beragam mengenai permasalahan atau objek yang hendak di teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa Teknik digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Mills dan Creswell (2005) dalam jurnal Hasanah (2017), Observasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan dan difokuskan untuk mengamati fenomena sosial dilapangan dan mencatat serangkaian perilaku atau jalannya suatu sistem dengan tujuan tertentu. Selain itu, observasi juga bertujuan untuk mengungkapkan hal-hal yang melatarbelakangi munculnya perilaku dan dasar dari sistem tersebut. Selain itu, Creswel menyatakan bahwa observasi merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti sendiri, bukan oleh sistem atau pun orang lain. Proses ini melibatkan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam konteks penelitian.

Menurut pandangan Mills dan Creswell, observasi dapat disimpulkan sebagai metode pengumpulan data yang dilakukan langsung oleh peneliti dengan rencana dan tujuan yang spesifik. Tujuannya adalah untuk mengamati serta mencatat fenomena yang terjadi di lapangan dan mengungkap faktor-faktor yang mendasar.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di lapangan, peneliti menemukan suatu fenomena yang mana di Kalurahan Wiladeg memiliki Badan Usaha Milik Kalurahan yakni BUM Kal Gemilang yang terlah berdiri sejak tahun 2019. Di Kalurahan Wiladeg memiliki berbagai potensi yang dapat dikelola untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan perekonomian lokal, namun kenyataannya

potensi yang ada belum dimanfaatkan dengan baik. Kehadiran Badan Usaha Miliki Kalurahan (BUM Kal) merupakan strategi memanfaatkan dalam mengelola potensi yang ada di kalurahan, dengan kehadiran BUM Kal potensi tersebut dapat dikelola secara efektif dan efesien untuk dimanfaatkan sebagai alat penggerak ekonomi ditingkat kalurahan.

Namun, kehadiran BUM Kal yang ada di Kalurahan wiladeg belum dapat dimanfaatkan secara baik oleh Pemerintah Kalurahan Wiladeg. Meskipun BUM Kal Gemilang telah lama dibentuk akan tetapi BUM Kal tersebut belum aktif dalam mengerakkan operasionalnya. Dari informasi yang didapatkan peneliti dilapangan bahwa BUM Kal di Kalurahan Wiladeg hanya beroperasi sementara dan mengalami kevakuman yang terbilang cukup lama. Meskipun telah ada gagasan dari masyarakat dalam mendukung operasional BUM Kal, Pemerintah Kalurahan belum mampu untuk mengoperasionalkan kembali BUM Kal yang ada. Hal ini menyebabkan potensi yang ada di Kalurahan Wiladeg tetap tidak terkelola dengan baik, sehingga manfaat yang bisa diperoleh dari pengelolaan potensi tersebut belum dirasakan oleh masyarakat.

b. Wawancara

wawancara merupakan teknik penting pengumpulan data dalam sebuah penelitian, terutama pada penelitian kualitatif. Dalam melakukan wawancara pewawancara harus mendapatkan kerja sama yang baik dari subjek atau responden. Keberhasilan wawancara

tergantung pada cara peneliti menjalankan tugasnya, karena tujuan utama wawancara adalah mendapatkan informasi yang akan dijadikan sebagai data, data tersebut sangat krusial untuk merumuskan hasil penelitian guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Rosaliza, 2015).

Dengan demikian, wawancara adalah kemampuan peneliti untuk memperoleh informasi atau data dengan cara menjalin kerja sama yang baik dengan subjek atau responden. Tujuan utama dari wawancara ini adalah mengumpulkan informasi yang akan digunakan sebagai data penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa informan mengenai bagaimana Kolaborasi Modal Politik Pemerintah Kalurahan dan Modal Sosial Masyarakat dalam Pengembangan BUM Kal di Kalurahan Wiladeg.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan dokumen seperti buku, informasi tertulis, media, foto, dan sebagainya yang digunakan sebagai sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen berupa profil Kalurahan Wiladeg, Visi dan Misi Lurah Wiladeg, RPJMKal, peraturan Kalurahan Wiladeg (AD/ART), APBKal, profil BUM Kal, RPK, rekaman wawancara, catatan hasil penelitian, serta dokumen-dokumen lain yang relevan.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Rijali (2018), analisis data merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menemukan dan mengorganisir catatan hasil observasi, wawancara, dan sumber data lainnya. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang sedang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan yang berguna bagi orang lain. Untuk mendalami pemahaman ini, analisis perlu dilanjutkan dengan upaya untuk menemukan makna yang terkandung dalam data yang telah dikumpulkan. Menurut Milles dan Huberman (1994) dalam jurnal Fadli (2021), menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis model dalam analisis data, yaitu: Pertama, reduksi data. Kedua, penyajian data dan Ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berikut adalah penjelasannya:

a. Reduksi Data

Reduksi data dalam analisis kualitatif adalah proses menyaring, memusatkan, dan meyederhanakan informasi yang relevan dari data lapangan penelitian. Tujuannya adalah untuk menajamkan fokus, memperjelaskan, dan membuat narasi yang dapat dipahami dengan baik serta menuju pada kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, reduksi data dalam analisis kualitatif memainkan peran penting dalam menyaring serta meyederhanakan informasi penting yang diperoleh dari data lapangan penelitian.

Reduksi data dalam konteks mengelola data hasil wawancara adalah proses penyederhanaan dan pemilihan data mentah yang diperoleh dari wawancara. Ini melibatkan pemusatan perhatian pada informasi yang paling relevan dengan tujuan penelitian, mengelompokkan data menjadi tema atau kategori, serta menyaring dan mengabstraksi data sehingga lebih mudah dianalisis dan diinterpretasikan. Proses ini membantu peneliti untuk fokus pada aspek-aspek penting dan mengurangi beban data yang tidak relevan, sehingga analisis dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif merupakan tahapan penting dalam mengorganisir informasi untuk memfasilitasi penarikan kesimpulan yang akurat. Proses penyajian data ini meliputi penyusunan uraian singkat, pembuatan bagan, atau format lain yang relevan dengan fokus penelitian. Dengan demikian, melalui penyajian data ini, peneliti dapat dengan lebih efektif memahami permasalahan yang diteliti dan merencanakan langkah-langkah berikutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dari proses yang telah dilakukan sebelumnya. Kesimpulan diambil dari analisis data yang telah dilakukan serta data yang telah diverifikasi berdasarkan bukti yang diperoleh dari lokasi penelitian. Secara ringkasnya, penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam penelitian

yang memperkuat hasil dari proses-proses sebelumnya. Berdasarkan bukti-bukti dari lapangan penelitian. Sehingga, kesimpulan yang dihasilkan dapat memberikan dasar yang kuat dan dapat dijadikan sebagai pijakan untuk menggambarkan temuan serta implikasi dari penelitian.

BAB II

PROFIL KALURAHAN WILADEG DAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN (BUM Kal)

A. Sejarah Kalurahan Wiladeg

Di Kalurahan Wiladeg, banyak penduduk mengenal sosok Simbah Gembong sebagai tokoh yang sangat dihormati dan diyakini sebagai pendiri desa. Kisahnya bermula pada masa jatuhnya Kerajaan Majapahit, ketika Simbah Gembong melarikan diri ke Gunungkidul dan menetap di wilayah yang kini menjadi Kalurahan Wiladeg. Menurut cerita turun-temurun, leluhur masyarakat Wiladeg adalah Eyang Kertayuda, yang terkenal karena menyelamatkan seekor anak harimau dari parit atau sungai. Dikisahkan dengan penuh kasih, hewan itu dipelihara, dan sejak saat itu Eyang Kertayuda dijuluki sebagai Mbah Gembong.

Asal usul nama “Wiladeg” sendiri berhubungan dengan keberadaan pohon Wilada yang dulu tumbuh subur di daerah itu. Nama “Wilada” berasal dari bahasa Kawi yang berarti Lo Gondang atau Welada (Lo). Nama “Wiladeg” kemudian terbentuk melalui proses akronim dalam bahasa. Ada juga pendapat lain mengenai asal usul nama itu, menyebutkan bahwa Wiladeg berasal dari “Wilah Ngadeg” (buluh bambu yang tegak), pandangan ini dipopulerkan oleh sesepuh Wiladeg, Ki Kartojemiko (Kijo). Menurut keyakinan masyarakat setempat, usia Kalurahan Wiladeg diperkirakan sebanding dengan usia candi yang ditemukan di Padukuhan Nglampar. Pada masa lalu, Ki Kertoyudo dan Ki Rau tiba di sebuah kalurahan yang ditemui dengan ramah oleh penduduk

setempat. Tempat itu hanya dihuni oleh beberapa orang, dengan sebagian besar wilayah tertutup semak dan hutan belantara. Ki Kertoyudo mendirikan tempat ibadah di Umbul Banteng dan membersihkan sumber air di sekitarnya. Seiring berjalananya waktu, jumlah keturunan Ki Kertoyudo dan Ki Rau bertambah, membuat kalurahan menjadi terlalu padat. Maka, Ki Rau dan keturunannya mencari wilayah baru di sebelah timur yang jauh dari perkampungan Ki Kertoyudo. Saat berkunjung ke rumah Ki Kertoyudo, mereka sering mengucapkan, “Mari kita ke Wilah Ngadeg untuk bertemu dengan Mbah Kertoyudo”. Lama kelamaan, nama “Wilah Ngadeg” berubah menjadi “Wiladeg” karena sering digunakan. Tradisi ini kemudian diabadikan saat acara kenduri Bresik Kalurahan dengan menetapkan nama “Wiladeg” untuk kalurahan tersebut..

B. Visi dan Misi Kalurahan Wiladeg

a. Visi

Visi Kalurahan Wiladeg dibentuk berdasarkan kontribusi utama dari visi Lurah yang dipilih melalui proses pemilihan langsung. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) ini telah ditetapkan untuk periode 2019-2025 dengan menggunakan pendekatan partisipatif, yang melibatkan pemerintah kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga kemasyarakatan kalurahan, dan masyarakat umum. Visi Kalurahan Wiladeg adalah gambaran jangka panjang dari aspirasi bersama dan arah yang diinginkan. Visi yang telah ditetapkan adalah “Mewujudkan

Pemerintahan Kalurahan Wiladeg yang Bersih, Masyarakat Mandiri, dan Pembangunan Berkelanjutan”.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi Kalurahan Wiladeg yang telah diuraikan sebelumnya, Misi Kalurahan Wiladeg untuk periode 2019-2025 dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan kalurahan yang jujur, transparan, akuntabel, dan mengedepankan musyawarah mufakat dalam pengambilan kebijakan.
2. Mendorong pemberdayaan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan masyarakat mandiri dan tangguh secara swadaya.
3. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya kalurahan, peran BUM Kal, dan pemberdayaan potensi PAKal.
4. Melaksanakan pembangunan di semua bidang yang merata, proporsional, berkualitas, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

C. Strategi Kebijakan

1. Strategi Internal

- a. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah kalurahan agar dapat memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan serta kegiatan lembaga-lembaga kalurahan.

- c. Mengelola keuangan kalurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
- e. Peningkatan sumber daya masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing menghadapi perkembangan lingkungan.
- f. Menggali potensi di wilayah kalurahan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) guna mendukung stimulan pemerintah dalam pembangunan.
- g. Meningkatkan SDM masyarakat melalui pelatihan di bidang pertanian, usaha kecil menengah (UKM), dan industri rumah tangga untuk meningkatkan perekonomian.
- h. Mendorong peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan.
- i. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kalurahan seperti infrastruktur pendukung ekonomi, sarana pendidikan, kesehatan, transportasi, penerangan, dan komunikasi.
- j. Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dan lembaga kalurahan dalam perencanaan partisipatif, pengawasan pelaksanaan pembangunan, serta evaluasi kegiatan di Kalurahan Wiladeg.
- k. Membangun hubungan kemitraan yang baik antara pemerintah kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan lembaga kemasyarakatan kalurahan.

2. Strategi Ekternal

- a. Membangun kemitraan yang kokoh dengan pemerintah di tingkat atas dan pihak ketiga untuk mencapai tujuan program secara efektif.
- b. Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan kalurahan yang tercantum dalam RPJMKal melalui partisipasi dalam forum musrembang tingkat kapanewon, kabupaten, serta forum-forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- c. Menata manajemen perencanaan pembangunan dengan mengidentifikasi target pembangunan supra kalurahan dan infra kalurahan untuk memastikan pembangunan sesuai dengan kewenangan kalurahan dan pemerintah di atasnya.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan

Kebijakan pembangunan ini diarahkan dalam kebijakan sebagai berikut:

- a. Bidang Penyelengaraan Pemerintahan Kalurahan
 1. Memfasilitasi peningkatan efisiensi pemerintahan kalurahan dan kesejahteraan Pamong Kalurahan.
 2. Mendorong peningkatan aktivitas Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan lembaga lain di tingkat kalurahan.
 3. Menyediakan peralatan kerja dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok pemerintah kalurahan, Bamuskal, dan lembaga kalurahan.
 4. Mengembangkan kebijakan kalurahan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya PAKal dengan mempertimbangkan potensi yang ada, memperbaiki manajemen arsip kalurahan, serta

memberikan informasi terbuka dan akuntabel terkait pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan kepada masyarakat.

5. Melaksanakan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, sehingga pencapaian pembayaran PBB sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
6. Mengurus pengadaan tanah milik kalurahan dan kelengkapan administrasi terkait tanah khas dan milik kalurahan.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

1. Memfasilitasi pelayanan pendidikan bagi anak usia dini melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengatasi stunting pada balita dengan menggelar posyandu, membangun jamban sehat, merangsang pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga (SPAL), dan memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.
3. Membangun infrastruktur penunjang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kalurahan, termasuk memenuhi kebutuhan dasar seperti rehabilitasi jalan, pembangunan dan perawatan prasarana jalan (talud, gorong-gorong, drainase, dan penerangan jalan), pembangunan jalan usaha tani, pembangunan jembatan, dan lain-lain.

4. Mengembangkan kalurahan dengan membangun infrastruktur seperti taman kalurahan, pemeliharaan lapangan olahraga, pengembangan Kawasan Kali Banteng, pemanfaatan bangunan calon makam yang tidak terpakai, perawatan atau rehabilitasi balai budaya, serta pembangunan gapura kalurahan dan gapura masuk padukuhan.
 5. Menyediakan air bersih bagi masyarakat kalurahan dengan pembangunan dan pengelolaan PAMDes.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
1. Mengembangkan kelompok seni melalui pelatihan dan penyediaan prasarana seni seperti kostum dan peralatan.
 2. Menjaga kelestarian budaya dan tradisi masyarakat kalurahan dengan memfasilitasi event-event budaya dan memberikan dukungan kepada lembaga budaya kalurahan.
 3. Memperkuat SDM dan sarana prasarana lembaga kemasyarakatan kalurahan.
 4. Meningkatkan kualitas SDM dan infrastruktur untuk linmas dan keamanan warga dalam menciptakan lingkungan yang aman, tenram, dan kondusif.
 5. Membangun komunikasi yang aktif dengan pengurus lembaga kemasyarakatan kalurahan untuk mendukung peran aktif lembaga kemasyarakatan kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan.

- d. Bidang Pemerdayaan Masyarakat Kalurahan
1. Meningkatkan infrastruktur irigasi untuk pertanian dan memberikan pelatihan pengelolaan hasil pertanian untuk meningkatkan perekonomian.
 2. Memberdayakan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan pelatihan dan dukungan teknis sebagai wadah kegiatan serta aspirasi para petani.
 3. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dengan menafaatkan inovasi serta teknologi tepat guna dalam sektor pertanian, peternakan dan perikanan.
 4. Mendukung pengembangan BUM Kalurahan (BUM Kal).
 5. Melatih dan meningkatkan kapasitas SDM pemerintah kalurahan dan Bamuskal.

D. Kondisi Geografis

Secara geografis Kalurahan Wiladeg terletak di Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, dengan luas wilayah mencapai 6,95 kilometer persegi. Kalurahan Wiladeg dapat dicapai dalam jarak sekitar 3 kilometer dari pusat pemerintahan desa, sekitar 6 kilometer dari Ibu Kota Kabupaten, dan sekitar 45 kilometer dari Ibu Kota Provinsi. Dari pusat pemerintahan, jaraknya sekitar 470 kilometer. Kalurahan Wiladeg terbagi menjadi 10 padukuhan, yaitu Padukuhan Wiladeg, Padukuhan Kerdon, Padukuhan Kendalrejo, Padukuhan Krambilduwur, Padukuhan Karangnongko, Padukuhan Tompak, Padukuhan Ngricik, Padukuhan Kayuwalang, Padukuhan Nglampar, dan Padukuhan Kenteng. Secara administratif Kalurahan Wiladeg berbatasan langsung dengan Kalurahan Kelor dan Ngawis di sebelah Timur, Kalurahan Semanuk di sebelah

Selatan, Kalurahan Bendungan di sebelah Barat, dan Kalurahan Bejiharjo di sebelah Utara.

E. Kondisi Demografi

1. Jumlah Penduduk

Kalurahan Wiladeg memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.531 jiwa yang tersebar dalam 1.734 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, terdapat 2.230 jiwa penduduk laki-laki dan 2.301 jiwa penduduk perempuan. Persebaran penduduk di setiap padukuhan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kalurahan Wiladeg

| No | Nama Padukuhan | Jenis Kelamin | | Jumlah KK | Jumlah Jiwa |
|--------|----------------|---------------|-------|-----------|-------------|
| | | L | P | | |
| 1. | Krambilduwur | 244 | 275 | 208 | 519 |
| 2. | Kendalrejo | 185 | 194 | 157 | 379 |
| 3. | Kerdon | 122 | 124 | 104 | 246 |
| 4. | Karangnongko | 323 | 139 | 241 | 652 |
| 5. | Ngricik | 337 | 341 | 241 | 678 |
| 6. | Tompak | 299 | 298 | 202 | 597 |
| 7. | Kayuwalang | 228 | 235 | 190 | 463 |
| 8. | Wiladeg | 135 | 138 | 103 | 273 |
| 9. | Kenteng | 183 | 194 | 149 | 377 |
| 10. | Nglampar | 174 | 173 | 139 | 347 |
| Jumlah | | 2.230 | 2.301 | 1.734 | 4.531 |

Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa Padukuhan Ngricik memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan total 678 jiwa, sementara Padukuhan Kerdon memiliki jumlah penduduk terendah, hanya 246 jiwa. Padukuhan Karangnongko juga menunjukkan jumlah penduduk yang signifikan dengan 652 jiwa. Secara keseluruhan, Kalurahan Wiladeg

memiliki populasi sebanyak 4.531 jiwa yang tersebar dalam 1.734 kepala keluarga, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.230 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.301 jiwa.

2. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian penduduk menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Wiladeg memiliki beragam jenis mata pencaharian, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Selain itu, ada juga yang bekerja sebagai aparatur sipil negara, pengusaha, peternak, pengrajin industri kecil, dan buruh bangunan. Meskipun beragam dalam mata pencahariannya, masyarakat Wiladeg tetap mementingkan nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman mata pencaharian tidak menghalangi terbentuknya solidaritas dan kesatuan dalam masyarakat Wiladeg. Berikut tabel mata pencaharian penduduk Kalurahan Wiladeg:

Tabel 2.3 Mata Pencaharian Kalurahan Wiladeg

| No | Mata Pencaharian | Jumlah Penduduk |
|--------|----------------------|-----------------|
| 1. | Apparat sipil negara | 114 |
| 2. | Karyawan | 111 |
| 3. | TNI/POLRI | 10 |
| 4. | Swasta | 499 |
| 5. | Petani | 2393 |
| 6. | Tukang | 243 |
| 7. | Buruh tani | 69 |
| 8. | Pensiunan | 74 |
| 9. | Nelayan | 19 |
| 10 | Peternak | 218 |
| 11. | Jasa | 138 |
| 12. | Pekerja seni | 48 |
| 13. | Pengerajin | 58 |
| 14. | Penganguran | 359 |
| 15. | Wiraswasta/pedagang | 178 |
| Jumlah | | 4.531 |

Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Wiladeg bermata pencaharian sebagai petani, diikuti oleh pekerja swasta. Namun, ada pula sejumlah penduduk yang menekuni berbagai profesi lainnya, seperti tukang, buruh tani, peternak, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan keberagaman mata pencaharian yang ada di masyarakat Wiladeg.

3. Tingkat Pendidikan

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Wiladeg bermata pencaharian sebagai petani, diikuti oleh pekerja swasta. Namun, ada pula sejumlah penduduk yang menekuni berbagai profesi lainnya, seperti tukang, buruh tani, peternak, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan keberagaman mata pencaharian yang ada di masyarakat Kalurahan Wiladeg:

Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|--------|---------------------------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1. | Tidak/Belum Sekolah | 454 | 650 | 1104 |
| 2. | Belum tamat SD/sederajat | 204 | 198 | 402 |
| 3. | Tamat SD/Sederajat | 317 | 371 | 688 |
| 4. | SMP/Sederajat | 410 | 429 | 839 |
| 5. | SMA/Sederajat | 683 | 558 | 1241 |
| 6. | Diploma I/II | 10 | 15 | 25 |
| 7. | Akademis/ D3/Sarjana Muda | 39 | 41 | 80 |
| 8. | Diploma Iv/Strata I | 106 | 97 | 203 |
| 9. | Strata II | 6 | 3 | 9 |
| 10. | Strata III | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 2.229 | 2.362 | 4.531 |

Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi pendidikan masyarakat di Kalurahan Wiladeg cukup tinggi, dengan sekitar 3.517 orang yang telah mengenyam pendidikan, sementara hanya 1.014 orang yang tidak memiliki pendidikan formal. Selain itu, Pemerintah Kalurahan Wiladeg juga telah membangun infrastruktur pendidikan yang mendukung, seperti Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Sekolah Dasar (SD). Meskipun demikian, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP, SMA, atau perguruan tinggi, masyarakat masih harus berpindah ke wilayah lain seperti Kapanewon, Kabupaten, bahkan hingga provinsi.

4. Kepercayaan

Agama dan kepercayaan masyarakat mencerminkan kebutuhan spiritual dan pencarian makna dalam kehidupan manusia. Mereka memegang peran penting dalam membentuk identitas individu, memberikan pedoman moral, dan berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang berbudaya. Di Kalurahan Wiladeg, penduduk menganut beragam agama. Kerukunan antar umat beragama dianggap sebagai dasar yang sangat penting dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat yang tenteram dan harmonis. Berikut adalah data masyarakat Kalurahan Wiladeg berdasarkan agama dan kepercayaan:

Tabel 2.5 Kepercayaan Masyarakat Kalurahan Wiladeg

| No | Kelompok | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|--------|------------------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1. | Islam | 1.740 | 1.591 | 3.331 |
| 2. | Kristen | 505 | 551 | 1.056 |
| 3. | Katolik | 84 | 59 | 143 |
| 4. | Hindu | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Buddha | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kepercayaan lain | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | | 2.330 | 2.201 | 4.531 |

Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg

Meskipun mayoritas masyarakat di Kalurahan Wiladeg memeluk agama Islam, yang berjumlah 3.331 jiwa, hal ini tidak mengakibatkan polarisasi atau fragmentasi masyarakat menjadi terpisah-pisah. Sebaliknya, dengan adanya keberagaman dalam agama dan kepercayaan, masyarakat Wiladeg tetap bersatu dan menjaga toleransi serta saling menghormati antar umat beragama, membentuk kesatuan yang kuat dan harmonis.

5. Adat dan Istiadat

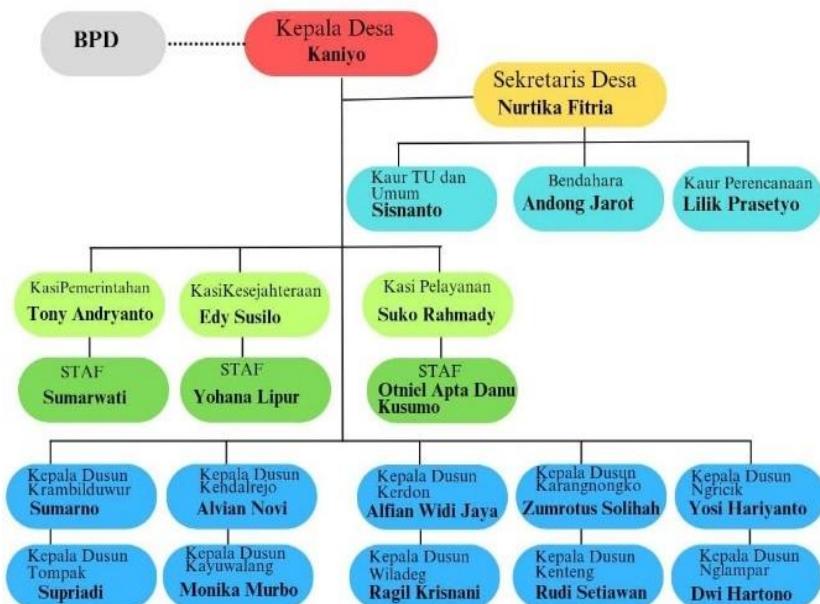
Adat istiadat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, memainkan peran sentral dalam menjaga harmoni, memperkuat ikatan sosial, dan melaksanakan fungsi-fungsi sosial. Di Kalurahan Wiladeg, warisan adat istiadat tetap dijaga dan dilestarikan hingga kini. Salah satu tradisi yang masih dijunjung tinggi adalah Bersih Desa, yang juga dikenal sebagai Rasulan. Tradisi ini telah ada sejak zaman dahulu dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Rasulan merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat Wiladeg atas berkah dan rahmat Tuhan yang terus mengalir, seperti kelimpahan hasil panen dan rezeki lainnya.

Dalam perayaan Rasulan, kegembiraan masyarakat diekspresikan melalui pesta rakyat yang mempersembahkan tontonan seni tradisional seperti Reog, Jhatil, dan lainnya. Selama acara tersebut, semangat gotong royong terlihat dalam membantu mempersiapkan segala kebutuhan sambil menyatukan berbagai perbedaan untuk membentuk masyarakat Wiladeg yang harmonis dan solid.

F. Pemerintahan

Pemerintahan Kalurahan Wiladeg, yang berada di Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dipimpin oleh Lurah Kaniyo. Struktur Pemerintahan Kalurahan terdiri dari berbagai bagian yang bekerja sama untuk mengelola dan melayani masyarakat setempat, sebagai berikut:

Bagan 2.1 Struktur Pemerintahan Kalurahan Wiladeg



Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg

Tabel 2.6 Data Personil Pemerintahan Kalurahan Wiladeg

| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Usia | Pendidikan |
|-----|-------------------------|--|---------------|----------|------------|
| | Kaniyo | Lurah (Kepala Desa) | L | 58 Tahun | S1 |
| 2. | Nurtika Fitria Reni, ST | Carik (Sekertaris Desa) | P | 33 Tahun | S1 |
| 3. | Andang Jarot Trigunawan | Kaur Danarta (Kepala Urusan Keuangan) | L | 60 Tahun | SPG |
| 4. | Sisnanto | Kaur Tata Laksana Dan Umum (Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum) | L | 49 Tahun | SLTP |
| 5. | Lilik Prasetyo | Kaur Pangripta (Kepala Urusan Perencanaan) | L | 38 Tahun | SMK |
| 6. | Suko Rahmadi | Kamituwa (Kepala Seksi Pelayanan) | L | 44 Tahun | SMK |
| 7. | Tony Andiyanto | Jagabaya (Kepala Seksi Pemerintahan) | L | 38 Tahun | SMK |
| 8. | Edy Susilo | Ulu-Ulu (Kepala Seksi Kesejahteraan) | L | 46 Tahun | SMK |
| 9. | Sumarno | KepalaDukuh Krambilduwur | L | 58 Tahun | SLTA |
| 10. | Alvian Novi Hadana | Kepala Dukuh Kendalrejo | L | 35 Tahun | D3 |
| 11. | Alfian Widi Jaya | Kepala Dukuh Kerdon | L | 46 Tahun | SLTA |
| 12. | Zumrotus Soliha | Kepala Dukuh Krangnongko | P | 32 Tahun | S1 |
| 13. | Yosi Haryanto | Kepala Dukuh Ngricik | L | 35 Tahun | SMA |
| 14. | Supriyadi | Kepala Dukuh Tompak | L | 38 Tahun | SLTA |
| 15. | Monika Murbo Astute | Kepala Dukuh Kayuwulang | P | 45 Tahun | S1 |
| 16. | Ragil Krisnani | Kepala Dukuh Wiladeg | P | 44 Tahun | S1 |
| 17. | Rudi Setyawan | Kepala Dukuh Kenteng | L | 48 Tahun | STM |
| 18. | Dwi Hartono | Kepala Dukuh Nglampar | L | 49 Tahun | SLTP |
| 19. | Sumarwati | Staf Pamong (Unsur Staf) | P | 48 Tahun | S1 |
| 20. | Otniel Apta Danu Kusumo | Staf Pamong (Unsur Staf) | L | 35 Tahun | SMA |
| 21 | Yohana Lipur Nugraheni | Staf Pamong (Unsur Staf) | P | 40 Tahun | SMA |

Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg

G. Struktur Badan Permusyawaratan Kalurahan

Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan di tingkat kalurahan. BPKal ini terdiri dari berbagai tokoh masyarakat yang dipilih atau diangkat melalui

mekanisme tertentu, dengan tujuan untuk memberikan masukan, menyepakati kebijakan, serta mengawasi jalannya pemerintahan kalurahan. Fungsi utama BPKal adalah memfasilitasi dialog dan musyawarah antara pemerintah kalurahan dengan masyarakat, serta menjadi wadah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pengelolaan wilayah. Dengan demikian, keberadaan BPKal di Kalurahan Wiladeg menjadi cermin dari partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka. Adapun struktur BPKal Kalurahan Wiladeg sebagai berikut:

Bagan 2.2 Struktur Badan Permusyawaratan Kalurahan



Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg

Tabel 2.7 Data Personil BPKal

| No | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Pendidikan | Jabatan |
|----|-------------------------------|---------------|------|------------|---|
| 1. | Tri Hardono | L | 51 | SMA | Ketua |
| 2. | Atmaji Priyo Yuwono, S.Pd. Sd | L | 59 | S1 | Waki Ketua |
| 3. | Natalia Bekti Kurniawati S.Pd | P | 39 | S2 | Sekertaris |
| 4. | Dra. Ambar Puryati | P | 65 | S1 | Kabid Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Dan Pembinaan Masyarakat |
| 5. | Maryanto | L | 68 | SMA | Anggota |
| 6. | Maya Rolina, Se | P | 47 | S1 | Anggota |
| 7. | Eko Budi Wahyuno | L | 48 | S1 | Kabid. Pembangunan Kalurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan |
| 8. | Setyo Sudarmono | L | 45 | SMA | Anggota |
| 9. | Darmono | L | 46 | SMA | Anggota |

Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg

H. Profil BUM Kal Gemicang

BUM Kal Gemicang di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, didirikan pada tanggal 30 Oktober 2019 berdasarkan Pasal 1 Bab 1. Proses pendiriannya di mulai melalui musyawarah yang melibatkan Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan masyarakat setempat. Kesepakatan dari musyawarah ini menjadi landasan utama dalam pendirian BUM Kal. Proses pendirian BUM Kal ini mengikuti tahapan berdasarkan kontribusi perorangan dan Undang-Undang yang berlaku. Setelah musyawarah kalurahan dan mencapai kesepakatan, langkah berikutnya adalah identifikasi potensi usaha oleh Pemerintah Kalurahan bersama perangkat kalurahan dan masyarakat setempat. Selanjutnya, disusunlah Anggaran Dasar

(AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai pedoman organisasi. AD berisi arahan pokok organisasi, sementara ART adalah aturan tertulis yang lebih rinci mengenai operasional organisasi dalam melaksanakan kegiatannya. Biasanya, ART disusun setelah pengelola terbentuk dan disahkan dalam rapat anggota.

Meskipun demikian, hingga saat ini BUM Kal Gemilang belum memiliki legalitas berbadan hukum. Pembentukannya didasarkan pada keputusan Kepala Desa Nomor 43 Tahun 2019, yang menegaskan pentingnya keberadaan BUM Kal untuk melaksanakan peran kalurahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menambah Pendapatan Asli Desa (PADes).

a. Visi dan Misi BUM Kal Gemilang

1. Visi

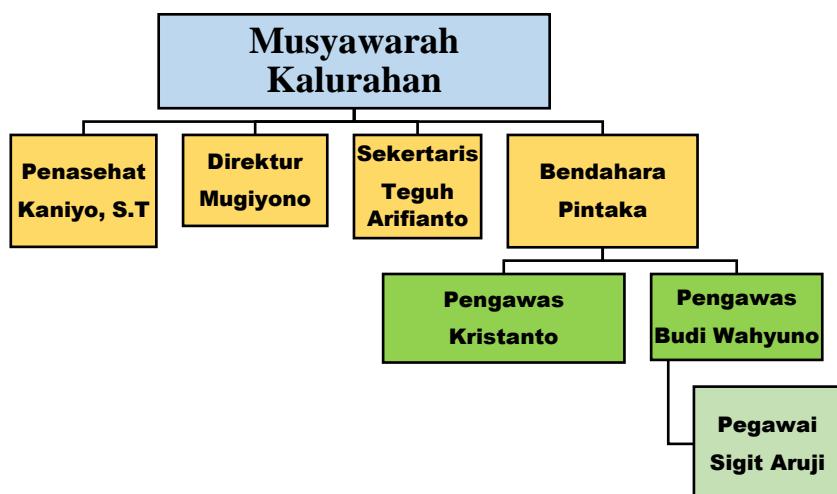
Visi BUM Kal Gemilang Kalurahan Wiladeg adalah “Mewujudkan kemandirian Kalurahan melalui pembangunan ekonomi yang bermatabat sesuai tata nilai budaya dan kelestarian lingkungan demi terwujudnya desa yang berdikari, mandiri, demokratis dan sejahtera”.

2. Misi

- a) Mengidentifikasi dan mengembangkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan menciptakan lapangan kerja.
- b) Menjadi perintis dalam pembangunan ekonomi desa yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
- c) Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal untuk memberikan nilai tambah secara ekonomi.

- d) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa.
- e) Memberikan layanan terbaik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga masyarakat desa.
- b. Struktur Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) dan daftar pengurus BUM Kal Gemicang.

Bagan 2.3 Struktur Organisasi BUM Kal Gemicang



Sumber: Profil BUM Kal Gemicang Kalurahan Wiladeg

- c. Daftar Pengurus BUM Kal Gemicang

Tabel 2.8 Data Pengurus BUM Kal Gemicang

| No | Nama | Jabatan |
|----|-----------------|------------|
| 1. | Kaniyo,S. T | Penasehat |
| 2. | Kristanto | Pengawas |
| 3. | Budi Wahyuno | Pengawas |
| 4. | Mugiyono | Direktur |
| 5. | Teguh Arifianto | Sekertaris |
| 6. | Pintaka | Bendahara |
| 7. | Sigit Aruji | Pegawai |

Sumber: Profil BUM Kal Gemicang Kalurahan Wiladeg

d. Penyertaan Modal

Tabel 2.9 Penyertaan Modal

| No | Tahun | Nilai | Peruntukan | Unit Usaha |
|----|-------|----------------|------------------------|------------------|
| 1. | 2019 | Rp. 39.950.000 | Penambahan modal usaha | Toko/Perdagangan |

Sumber: Rencana Program Kerja (RPK) tahun 2024

Dari data tersebut mengenai penyertaan modal pada tahun 2019 sebesar Rp. 39.950.000 untuk menambah modal usaha pada unit usaha toko atau perdagangan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kalurahan menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan usaha di Kalurahan Wiladeg. Penyertaan modal ini bertujuan untuk memperkuat operasional dan pertumbuhan usaha lokal secara konkret.

e. Potensi BUM Kal Gemilang

Adapun beberapa potensi yang dimiliki kalurahan yang dapat untuk dikelola oleh BUM Kal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10 Potensi BUM Kal Gemilang

| No | Potensi | Kondisi Harapan | Strategi Memanfaatkan Potensi |
|----|-------------|---|--|
| 1. | Pertanian | Bisa membeli hasil pertanian petani setempat saat penjualan hasil panen, petani mendapatkan harga yang baik. Juga memfasilitasi dalam pengadaan bibit maupun pupuk serta alat pertanian bagi petani setempat. | Mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada mulai dari Poktan, KWT (Kelompok Wanita Tani), dan sebagainya. |
| 2. | Perternakan | Masyarakat dapat mengembangkan sistem perternakan yang modern dan dengan mudah bisa membeli pakan ternak. | Bekerjasama dengan gapokan atau kelompok-kelompok padukuhan untuk melakukan sosialisasi mengenai cara berternak yang |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | baik dan lebih menguntungkan dan menyediakan pakan ternak untuk dibeli peternak. |
| 3. | SDA | SDA dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga bisa mendatangkan penghasilan | Banyak berinovasi melakukan sinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan masukan portif dalam hal pengelolaan SDA. |
| 4. | Jumlah Penduduk | Penduduk yang menjadi pasar bagi usaha BUM Desa | Melakukan banyak sosialisasi tentang program BUM Desa, dan banyak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan usaha. |
| 5. | Wilayah Wisata | Mendapatkan imbas dari kondisi wilayah Kabupaten Gunungkidul yang semakin dikenal sebagai tujuan wisata | Memanfaatkan kondisi alam maupun sosial di Kalurahan Wiladeg untuk bisa menjadi daya Tarik wisata sehingga bisa menjadi daerah tujuan wisata. |
| 6. | Terdapat beberapa sekolah dan kantor sekitar Kalurahan Wiladeg | Bisa menjalin kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan kantor seperti ATK, Fotocopy. | Lebih intes dalam melakukan lobi dan koordinasi pada kantor-kantor yang berada di sekitar Kalurahan Wiladeg |
| 7. | Berada di jalur strategis yang menghubungkan luar kota, luas provinsi serta terdapat kantor dan sekolah | Mampu menjalankan usaha pengelolaan sampah | Melakukan koordinasi dengan Lurah dan stakeholder |
| 8. | Terdapat Pam Dusun yang belum dikelola secara maksimal | Pam Dusun menjadi unit Usaha BUM Desa, dengan pengelolaan yang lebih baik dan profesional | Melakukan koordinasi dengan stakeholder dan dusun terkait. |

Sumber: Rencana Program Kerja (RPK) tahun 2024

f. Rencana Kerja BUM Kal Gemilang

Tabel 2.11 Rencana Kerja

| No | Program/Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp.) | Sumber | Output | Indikator keberhasilan |
|-----|--|------------------------|--------|--|---|
| 1. | Rehab Toko | 10.000.000 | APBKal | Tokoh menjadi lebih representatif | Toko semakin ramai |
| 2 | Belanja inventaris | 5.000.000 | | | |
| 3. | Belanja barang dagangan | 100.000.000 | APBKal | Barang dagangan ATK photocopy, gas, pulsa, pupuk, dan pakan ternak | Menambah keuntungan dari kegiatan perdagangan |
| 4. | Mesin photocopy | 20.000.000 | APBKal | | |
| 5. | Pembuatan neon box dan spanduk | 2.000.000 | APBKal | Spanduk/banner dan neon box | Toko semakin menarik sehingga menambah daya tarik konsumen/pengunjung |
| 6. | Peningkatan kapasitas pengelola dan pegawai BUM Desa | 2.000.000 | APBKal | | |
| 7. | Penyertaan dana pengelola Pamdus | 15.000.000 | APBKal | | |
| 8. | Pengadaan etalase dan kursi | 4.000.000 | APBKal | | |
| 9. | Pengadaan showcase | 5.000.000 | APBKal | | |
| 10. | Modal untuk jasa pembayaran/ BRI link | 20.000.000 | | | |
| 11. | Penyusunan laporan pertanggungjawaban | 1.000.000 | APBKal | | |
| 12. | Koordinasi-koordinasi | 6.000.000 | APBKal | | |

Sumber: Rencana Program Kerja (RPK) tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, pengalokasian anggaran untuk BUM Kal menunjukkan pentingnya perencanaan dan pengelolaan anggaran dalam kerangka APBKal (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan). APBKal merupakan sarana untuk mengatur dan mengelola pendapatan serta pengeluaran yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik ditingkat kalurahan. Dalam konteks APBKal, alokasi anggaran untuk rehabilitas toko,

pembelian investaris dan barang dagangan, serta pembuatan fasilitas seperti photocopy dan neon adalah langkah strategis. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui BUM Kal, tetapi juga untuk meningkatkan fasilitas dan layanan yang bersedia bagi masyarakat desa. Penyertaan data untuk pengelolaan Pam dusun, peningkatan kapasitas SDM, serta koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban merupakan keterbukaan administrasi ditingkat kalurahan.

Secara keseluruhan, pengalokasian anggaran ini sejalan dengan prinsip APBKal dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat kalurahan. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menggunakan sumber daya publik secara efisien dan memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan kalurahan demi kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu yang telah ditentukan, berikut APBKal tahun 2024 Kalurahan Wiladeg:

Tabel 2.12 APBKal Tahun 2024 Kalurahan Wiladeg

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (RP) | KETERANGAN |
|----------|--|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | PENDAPATAN | | |
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 113.234.000,00 | |
| 4.2 | Pendapatan Transfer | 2.487.022.700,00 | |
| 4.3 | Pendapatan Lain-lain | 33.230.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 2.633.486.700,00 | |
| 5 | BELANJA | | |
| 5.1 | Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 1.195.397.417,00 | |
| 5.2 | Pelaksanaan Pembangunan | 836.133.750,00 | |
| 5.3 | Pembinaan Kemasyarakatan | 221.954.400,00 | |
| 5.4 | Pemberdayaan Kemasyarakatan | 281.235.300,00 | |
| 5.5 | Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa | 117.494.550,00 | |
| | JUMLAH SUPRLUS/(DEFISIT) | 2.652.215.317,00 (18.728.617,00) | |
| 6 | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 243.728.617,00 | |
| | Pengeluaran Pembiayaan | 225.000.000,00 | |
| | Selisih Pembiayaan (a-b) | 18.728.617,00 | |
| | SILPA Tahun Anggaran Berkenaan | 0,00 | |

Sumber: APBKal Kalurahan Wiladeg Tahun 2024

Berdasarkan data diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa Kalurahan mendapatkan pendapatan dari Pendapatan Transfer, Pendapatan Asli Desa, dan Pendapatan Lain-lain, dengan total pendapatan mencapai Rp.2.633.486.700,00. Belanja terbesar dialokasikan untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa, sementara anggaran lainnya difokuskan pada pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Meskipun mengalami defisit kecil sebesar Rp.18.728.617,00 kalurahan ini menggunakan pembiayaan sebesar Rp.243.728.617,00 untuk menutupi kekurangan tersebut. Secara keseluruhan, APBKal menunjukkan komitmen untuk pembangunan

berkelanjutan dan pengelolaan keuangan yang transparan serta bertanggung jawab.

g. Perkiraan Perhitungan Keuntungan Usaha

A. Modal yang dibutuhkan adalah:

Tabel 2.13 Perkiraan Perhitungan Keuntungan Usaha

| No | Jenis usaha | Besaran |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Unit perdagangan ATK, photocopy, pulsa, dan gas | Rp. 115.000.000 |
| 2. | Sarana pertanian dan peternakan | Rp. 30.000.000 |
| 3. | Jasa pembayaran | Rp. 20.000.000 |
| 4. | Unit PAM dusun | Rp. 15.000.000 |
| 5. | Lain-lainnya | Rp. 10.000.000 |
| Total | | Rp. 190.000.000 |

Sumber: Rencana Program Kerja (RPK) tahun 2024

B. Keuntungan Yang Diambil

Dengan asumsi bahwa keuntungan yang diperoleh sebesar 5%-15% yang dapat diambil dari belanja barang maka dengan diambil profit margin rata-rata dari 5% adalah 10%. Berikut asumsi perhitungan keuntungan tiap bulan:

Tabel 2.14 Keuntungan Yang Diambil

| No | Jenis Usaha | Keuntungan |
|-------|---|---------------|
| 1. | Unit perdagangan ATK, photocopy, pulsa, gas (10%) | Rp. 4.000.000 |
| 2. | Sarana pertanian dan peternakan (10%) | Rp. 2.700.000 |
| 3. | Jasa pembayaran (10%) | Rp. 2.000.000 |
| 4. | Unit PAM dusun (3 lokasi) 5000/meteran | Rp. 1.200.000 |
| Total | | Rp. 9.900.000 |

Sumber: Rencana Program Kerja (RPK) 2024

Berdasarkan asumsi bahwa keuntungan yang diperoleh adalah 10% dari belanja barang dan analisis keuntungan setiap bulan. Total keuntungan dari berbagai unit usaha adalah sebesar Rp. 9.900.000 kontribusi dari berbagai unit usaha ini menunjukkan adanya diversifikasi sumber pendapatan yang stabil dan berpotensi memberikan keuntungan yang signifikan setiap bulannya. Dengan menggunakan pendekatan profit margin rata-rata sebesar 10%, usaha ini memiliki prospek yang baik untuk berkembang lebih lanjut.

C. Biaya Operasional

Perkiraan kebutuhan biaya operasional setiap bulan

- a. Listrik =Rp. 200.000
 - b. Gaji Pegawai (2 orang) =Rp. 1.400.000
 - c. Biaya Operasional Lain =Rp. 500.000
 - d. Biaya Perawatan =Rp. 500.000
- Total =Rp. 2.600.000

D. Laba

Rp. 9.000.000 - Rp. 2.600.000 =Rp. 7.300.000

E. BEP

Keuntungan per tahun Rp. 7.300.000 x 12 = Rp. 87.600.000

Lama balik modal Rp. 190.000.000 : Rp. 87.600.000= Rp. 2,16

Dari data analisis perhitungan tersebut, diperkirakan usaha ini akan balik modal ditahun kedua.

Dengan adanya Rencana Program Kerja (RPK) pada BUM Kal memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berkelanjutan. Sehingga potensi-potensi yang ada di kalurahan dapat dimanfaatkan sebagai alat penggerak dalam meningkatkan perekonomian ditingkat lokal dan mensejahterakan masyarakat desa. Selain itu, RPK memungkinkan identifikasi dan pemetaan potensi lokal yang lebih komprehensif, serta pengembangan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Hal ini menciptakan peluang untuk kolaborasi antara Pemerintah Kalurahan, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya RPK, pengelolaan BUM Kal dapat lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen desa dan memperkuat rasa memiliki serta komitmen bersama dalam pembangunan desa.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan yang akan diuraikan, peneliti akan mendalami lebih lanjut mengenai Kolaborasi antara Modal Politik Pemerintah Kalurahan dan Modal Sosial Masyarakat Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo. Hasil penelitian ini didasari pada fokus penelitian dan temuan di lapangan yang disajikan dengan data secara eksplisit dan terperinci yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Setelah melakukan penelitian lapangan dan mengumpulkan data dari narasumber yang relevan sesuai dengan batasan penelitian, maka peneliti akan melanjutkan dengan menganalisis data tersebut. Tujuan dari analisis data adalah untuk merangkum informasi tersebut sehingga dapat diperoleh pemahaman yang jelas tentang Kolaborasi Modal Politik Pemerintah Kalurahan dan Modal Sosial Masyarakat dalam Pengembangan BUM Kal di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo.

Kolaborasi ini mencakup bagaimana relasi Pemerintah Kalurahan berkontribusi dalam pengembangan BUM Kal serta implementasi kebijakan yang mengatur operasional BUM Kal. Kontribusi partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting karena memperngaruhi proses pengembangan BUM Kal dengan membangun relasi antara Pemerintah Kalurahan, masyarakat, dan stakeholder lokal dalam pengembangan BUM Kal untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, untuk

mendalami lebih lanjut hasil penelitian ini, peneliti memfokuskan pada tiga sub Bab berikut:

A. Relasi Pemerintah Kalurahan Dalam Mendukung Pengembangan

BUM Kal

Pemerintah Kalurahan memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan potensi desa. Dimana Pemerintah berfungsi sebagai pengarah dan wadah bagi masyarakat, Tanpa keberadaan Pemerintah, Masyarakat mungkin tidak menyadari potensi yang dimiliki desa karena keterbatasan pengetahuan. Oleh karena itu Peran Pemerintah Kalurahan sangat penting dalam mengembangkan potensi desa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal). Pendirian BUM Kal ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan perekonomian desa, pendapatan desa serta memberikan kemandirian dengan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat atau daerah.

Dalam pengembangan BUM Kal, Pemerintah Kalurahan dapat memberikan modal melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang terpisah, dengan tujuan untuk mengelola aset, layanan, dan usaha lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang mengamanatkan bahwa BUM Kal merupakan Badan Usaha yang dimiliki sebagian besar atau seluruhnya oleh Kalurahan melalui penyertaan modal langsung dari kekayaan desa yang terpisah, dengan fokus pada pengelolaan aset, layanan, dan usaha lain demi meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Kalurahan. Pentingnya regulasi ini adalah untuk memastikan distribusi sumber daya secara adil kepada masyarakat, yang diatur oleh Undang-Undang Desa dengan menetapkan empat fungsi utama Pemerintah Kalurahan: Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembinaan Kemasyarakatan. Dengan demikian, keberadaan BUM Kal dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi Kalurahan dan masyarakat secara keseluruhan.

Modal politik dalam konteks ini mencakup upaya Pemerintah Kalurahan dalam memberikan dukungan kebijakan, penyertaan modal, penguatan regulasi, dan membangun kerja sama dengan stakeholder lokal untuk memfasilitasi operasional BUM Kal. Pada fokus penelitian ini akan membahas bagaimana kebijakan pemerintah kalurahan mempengaruhi pendirian, pertumbuhan, dan keberlanjutan BUM Kal. Selain itu, analisis ini akan menyoroti efektifitas penyertaan modal, implementasi regulasi yang mendukung, serta upaya pemerintah kalurahan dalam membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat dan pihak-pihak lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi lokal melalui BUM Kal.

Untuk menelaah lebih jauh mengenai relasi modal politik Pemerintah Kalurahan dalam mendukung pengembangan BUM Kal berikut ini akan saya sajikan hasil wawancara mendalam dengan Kaniyo selaku Lurah Wiladeg, beliau mengatakan bahwa:

“BUM Kal saat ini masih dalam proses perencanaan untuk dikembangkan kembali setelah sebelumnya BUM Kal Gemilang mengalami kevakuman. Dalam menjalankan kembali BUM Kal ini, kami bekerja sama dengan BPD dan pengurus BUM Kal dalam perencanaan program yang akan dijalankan. Selain itu, kami juga berencana untuk bekerja sama dengan PAM dusun yang dimiliki desa

untuk dikelola oleh BUM Kal. Saat ini, sudah ada tiga PAM dusun yang dibuat, namun belum dikelola oleh BUM Kal. Oleh karena itu, kami sedang berusaha untuk menjalin kerja sama dalam mengelola PAM dusun tersebut. Akan tetapi, kerja sama dengan pihak lain di luar pemerintahan belum terjalin karena BUM Kal saat ini belum beroperasi” (*Hasil Wawancara 13 Maret 2024*).

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan, bahwa BUM Kal telah berhasil menjalin kerja sama dengan pihak internal pemerintahan seperti BPD, pengurus BUM Kal, dan RT/RW. Menandakan langkah awal yang positif dalam membangun kemitraan ditingkat lokal. Kerja sama dengan pihak-pihak ini dianggap penting karena mereka memiliki peran strategis dalam pemerintahan desa dan dapat memberikan dukungan yang signifikan dalam pelaksanaan program-program pengembangan.

Selain itu, BUM Kal sedang dalam proses menjalin kerja sama dengan Pam Dus dan kelompok tani. Ini menandakan komitmen untuk melibatkan berbagai pihak yang relevan dalam pengembangan BUM Kal. Kerja sama dengan Pam Dus dan juga kelompok tani dianggap penting karena mereka memiliki pengetahuan serta pengalaman khusus dalam bidang tertentu, seperti dalam pengelolaan lingkungan dan pertanian. Terkendalinya proses kerjasama dengan pihak non-pemerintah diluar lingkup pemerintahan disebabkan oleh kevakuman yang dialami oleh BUM Kal dalam waktu yang cukup lama. Hal ini mungkin mengakibatkan kurangnya jaringan dan juga hubungan yang diperlukan untuk menjalin kemitraan dengan stakeholder eksternal. Oleh karena itu membangun kembali jaringan dan reputasi BUM Kal dalam komunitas lokal menjadi prioritas penting dalam memperluas kerja.

Selanjutnya akan disampaikan oleh Nurtika Fitria Reni selaku Carik Kalurahan Wiladeg, beliau mengatakan bahwa;

“Saat ini, BUM Kal belum beroperasi karena kepengurusan sebelumnya mengundurkan diri sehingga tidak ada yang mengelola usaha yang ada. Oleh sebab itu, pemerintah kalurahan dan BPKal bekerja sama untuk membentuk kembali kepengurusan BUM Kal agar dapat melanjutkan operasionalnya, dengan harapan BUM Kal yang baru dapat memanfaatkan potensi yang ada di Kalurahan Wiladeg secara optimal dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.”. (*Hasil Wawancara 13 Maret 2024*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan, bahwa adanya kerja sama antara Pemerintah Kalurahan dan BPKal yakni dalam membentuk kembali kepengurusan BUM Kal, hal ini menunjukkan adanya komitmen bersama untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh BUM Kal. Ini merupakan langkah yang positif kerena menunjukkan keseriusan dalam mendukung keberlangsungan pada operasional BUM Kal. Melalui kerja sama ini, Pemerintah Kalurahan dan BPKal memiliki peran yang signifikan dalam menyediakan bimbingan, dukungan, dan juga arahan bagi BUM Kal. Yang mana mereka dapat membantu dalam mengatasi kendala pembiayaan dengan mencari solusi alternatif atau mengarahkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan dengan kebutuhan BUM Kal.

Dengan adanya pembentukan kembali kepengurusan BUM Kal merupakan langkah kritis untuk melanjutkan operasional BUM Kal. Namun, penting untuk dipastikan bahwa kepengurusan yang baru memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola BUM Kal secara efektif. Disisi lain diperlukan juga dukungan dalam pengembangan kapasitas SDM untuk memastikan keberlanjutan operasional BUM Kal dimasa mendatang. Dalam memastikan keberlanjutan operasional BUM Kal maka perlu dirinci lebih jauh lagi terkait bagaimana kerja sama Pemerintah Kalurahan dalam mengembangkan BUM Kal hal ini telah disampaikan oleh Tri Hardono selaku ketua BPKal, beliau mengatakan bahwa:

“Kami BPKal dan Pemerintah Kalurahan aktif terlibat dalam membangun kembali BUM Kal yang sebelumnya mengalami kevakuman. Kerja sama ini dimulai dari tahap perencanaan, yang mencakup Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Musrenbang ini bertujuan untuk menyelaraskan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BUM Kal. Selanjutnya, pendanaan untuk BUM Kal dibahas bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan pengurus BUM Kal.” (*Hasil Wawancara 25 Maret 2024*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan, bahwa adanya *Collaborative governance*, yakni komitmen kerja sama untuk mendukung pengembangan dan keberlanjutan BUM Kal. Kolaborasi ini tidak hanya menguatkan infrastruktur ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat tatakelola yang trasnparan dan pasrtisipatif. Oleh sebab itu dalam manajemen operasional perlu adanya kebijakan yang mengatur berbagai aspek untuk memastikan operasional yang efisien dan efektif. Mengenai kebijakan yang mengatur BUM Kal akan disampaikan oleh Kaniyo selaku Lurah

“BUM Kal di Wiladeg namanya BUM Kal Gemilang ini sudah ada sejak tahun 2019, unit usaha yang ada di BUM Kal itu penampungan air bersih, perdagangan eceran, perdagangan padi dan palawija, pengumpulan limbah dan sampah, aktivitas fotocopy dan sewa. Akan tetapi BUM Kal tersebut masih belum beroperasi, dulu sempat berjalan yaitu BUM Kal fotocopy dan ATK akan tetapi hanya beroperasi sebentar hal itu dikarenakan pembiayaan, dan juga jasa untuk melanjutkan usaha tersebut tidak ada. Dalam operasionalnya tentu memiliki kebijakan atau peraturan yang mendasar, tidak bisa kita mendirikan begitu saja tanpa adanya kebijikan. Untuk kebijakan BUM Kal Gemilang itu ada dalam AD ART disitu sudah tersusun peraturan mengenai BUM Kal ini” (*Hasil Wawancara 13 Maret 2024*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah memiliki berbagai unit usaha yang direncanakan, dalam operasionalnya masih terhambat oleh beberapa faktor. Salah satunya terhambat oleh pembiayaan yang mengakibatkan beberapa unit usaha seperti fotocopy dan ATK tidak dapat beroperasi secara berkelanjutan. Selain itu keberadaan kebijakan yang tertuang dalam AD ART sebagai landasan hukum dan operasional BUM Kal sudah ada,

namun implementasinya belum mampu menjawab tantangan operasional yang dihadapi. Selanjutnya mengenai kebijakan dalam operasional BUM Kal akan disampaikan oleh Nurtika Fitria Reni selaku Carik, beliau mengatakan bahwa;

“Jadi, kebijakan yang jelas sangat penting untuk memastikan bahwa BUM Kal dapat beroperasi dengan efektif. Kebijakan ini biasanya diatur dan dijelaskan secara rinci dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUM Kal. AD/ART ini merinci struktur organisasi, tata cara pengelolaan, dan tata tertib operasional dari BUM Kal, yang sangat penting untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan dalam pengelolaan badan usaha tersebut. tujuan pendirian, dan juga mekanisme operasional BUM Kal. AD ART ini juga harus selaras dengan RPJMDes, artinya harus ada kaitan yang era tantara AD ART dan RPJMDes. RPJMDes ini kan merupakan panduan startegis pembangunan desa dalam beberapa tahun kedepan. Terdapat visi, misi, serta tujuan pembangunan Kalurahan dalam RPJMDes harus tercermin dalam setiap aspek pembangunan, termasuk pembentukan BUM Kal ini. Oleh karena. AD ART BUM Kal harus sejalan dengan RPJMDes agar BUM Kal ini dapat berkontribusi secara optimal terhadap tujuan pembangunan” (*Hasil Wawancara 13 Maret 2024*).

Dari jawaban informan diatas, menunjukkan pentingnya kebijakan yang mengatur Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal). Dan kebijakan ini tertuang dalam AD ART BUM Kal, yang menguraikan struktur organisasi, tujuan pendirian, dan mekanisme operasional secara detail. Pentingnya keselarasan antara AD ART dan RPJMDes karena menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. RPJMDes berperan sebagai panduan strategis pembangunan desa dalam beberapa tahun kedepan, yang mana mencakup visi, misi, dan tujuan pembangunan. Oleh sebab itu, penting bagi AD ART BUM Kal untuk sejalan dengan RPJMDes guna memastikan bahwa BUM Kal dapat memberikan kontribusi optimal terhadap tujuan pembangunan desa yang telah ditetapkan.

Dengan adanya kebijakan yang tertuang dalam AD ART ini menunjukkan bahwa terdapat kerangka kerja yang sudah disepakati antara pemerintah

kalurahan dan BUM Kal dalam upaya pengembangan hal ini membuktikan bahwa adanya kolaborasi modal politik antara pemerintah kalurahan dan BUM Kal. Dalam konteks kolaborasi, penting bagi pemerintah kalurahan untuk tidak hanya menyediakan kerangka regulasi, tetapi juga terlibat aktif dalam memfasilitasi pertumbuhan dan memperkuat kemitraan dengan BUM Kal serta stakeholder lokal lainnya.

Dalam konteks modal politik, penyertaan pendanaan untuk Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) juga merupakan bentuk dukungan yang signifikan untuk pengembangan BUM Kal itu sendiri. Pendanaan ini tidak hanya memberikan sumber daya finansial yang diperlukan untuk operasional dan ekspansi, tetapi juga mencerminkan komitmen politik terhadap pemberdayaan ekonomi lokal. Untuk menelaah lebih jauh mengenai modal politik pemerintah kalurahan dalam mendukung pengembangan BUM Kal yang mencakup penyertaan pendanaan untuk BUM Kal, akan disampaikan oleh Kaniyo selaku Lurah Kalurahan Wiladeg beliau mengatakan bahwa:

“penyertaan permodalan untuk BUM Kal ini memang salah satu program prioritas kami. Dan untuk penyertaan permodalan untuk BUM Kal ini dari APBKal. Yang kemudian dana ini akan digunakan untuk berbagai kebutuhan BUM Kal, khususnya pembangunan Gedung kantor yang akan menjadi pusat operasional kami. Selain itu juga dana ini akan digunakan untuk mendukung program-program usaha yang sudah kami rencanakan bersama pengurus BUM Kal. Prioritas usaha yang rencanaknya akan kami jalankan yaitu pada bidang pertanian yakni menyediakan perlengkapan alat dan bahan pertanian. Akan tetapi ini masih dalam tahapan perencanaan” (*Hasil Wawancara 13 Maret 2024*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa adanya langkah yang positif dan strategis dalam mendukung pengembangan dan keberlanjutan BUM Kal. Dengan mengalokasikan dana yang digunakan untuk pembangunan

Gedung kantor, yang merupakan infrastruktur dasar yang penting untuk operasional yang efisien. Dengan menerapkan transparansi dana sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program yang akan direncanakan tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mugiyono selaku ketua BUM Kal wiladeg beliau mengatakan bahwa:

“jadi gini mba, dalam penyertaan pendanaan BUM Kal ini, modal sebesar RP 96.500.000 akan dialokasikan untuk pembangunan Gedung BUM Kal. Saat ini, BUM Kal belum memiliki kantor sendiri untuk menjalankan operasionalnya. Selain itu, dana ini juga akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. BUM Kal berencana mendirikan beberapa unit usaha yang memerlukan investasi besar. Oleh karena itu, program-program ini masih dalam tahap perencanaan dan belum diimplementasikan” (*Hasil Wawancara 25 Maret 2024*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa, komitmen Pemerintah Kalurahan dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui BUM Kal. Pengalokasian dana sebesar RP 96.500.000 untuk pembangunan Gedung BUM Kal ini merupakan langkah awal yang penting, kerena Gedung tersebut akan menjadi pusat operasional dan administrasi yang diperlukan untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan usaha. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tri Hardono selaku ketua BPKal Wiladeg, beliau mengatakan bahwa:

“BUM Kal Wiladeg kan Namanya BUM Kal Gemilang dan itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 2019 masih PJ nya pak Sudiono, sekarang sudah diberikan jabatan projo di Kapanewon dulu PJ disini di Wiladeg. Kemudian berbincangan dari Muskal kita menghendaki membentuk BUM Desa sehingga muncul lah nama Gemilang, disitu ada kepengurusan, dan beroperasi. Akan tetapi berjalannya waktu sempat vakum karena ada kendala atau tidak berhasil dan kepengurusan juga waktu itu vakum, kemudian kita mulai lagi pada desember tahun 2023, ini dengan kepengurusan yang baru. Dan kalo berbicara kerja sama antara BPD dan Pemerintah Kalurahan itu sudah dimulai dari perencanaan, Muskal perubahan dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh BUM Kal, kemudian ada Perkal penyertaan modal yang dimana dari dana desa yang

disisikan untuk usaha desa melalui BUM Kal dana yang sudah ada sekitaran Rp 100.000.000 sekian, kemudian disepakati maka dibentuklah kepengurusan baru untuk lima tahun kedepan” (*Hasil Wawancara 25 Maret 2024*).

Dari jawaban informan diatas, menunjukkan keterlibatan BPKal dan Pemerintah Kalurahan yakni mulai dari tahap perencanaan hingga penyertaan modal menunjukkan adanya kolaborasi yang erat dalam mendukung BUM Kal. Hal ini merupakan langkah positif yang menunjukkan komitmen bersama untuk mengembangkan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Penyertaan modal dari dana desa untuk usaha desa melalui BUM Kal merupakan strategi yang cerdas dalam memanfaatkan sumber daya lokal untuk pengembangan ekonomi. Hal ini menunjukkan inisiatif untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada secara efektif.

Keterlibatan Muskal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kegiatan-kegiatan BUM Kal menunjukkan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan usaha kalurahan. Ini bisa membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil menggambarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, melalui kerja sama dengan Pam Dusun, tokoh masyarakat, dan kelompok tani, ini memperlihatkan adanya dorongan terhadap pengembangan kapasitas dan kemitraan lokal. Hal ini tidak hanya dapat memperkuat BUM Kal dalam hal sumber daya dan jaringan, tetapi juga memperkuat hubungan dengan komunitas lokal.

Penyertaan pendanaan sering kali membawa manfaat tambahan melalui akses yang lebih luas ke pasar, teknologi, dan kemitraan strategis.

Untuk memperkuat konsep kolaborasi yang berfokus pada pengembangan BUM Kal maka pemerintah kalurahan dapat melakukan upaya dalam bentuk

memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai BUM Kal terkhususnya dalam pengembangan BUM Kal. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai aspek, misalnya manajemen usaha, keuangan, pemasaran, dan juga pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Selain itu sosialisasi mengenai pentingnya BUM Kal sebagai instrument untuk pemberdayaan ekonomi lokal juga perlu disampaikan kepada masyarakat secara langsung. Dengan adanya pelatihan serta sosialisasi yang baik, anggota BUM Kal akan lebih siap dalam mengelola usaha mereka dengan efisien. Masyarakat juga akan lebih memahami peran serta manfaat dari keberadaan BUM Kal. Sehingga dapat mendukung dan berkontribusi aktif dalam pengembangan ekonomi lokal. Hal ini akan memperkuat kerjasama antara pemerintah kalurahan, BUM Kal, dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan di kalurahan. Untuk menelaah lebih dalam mengenai pelatihan maupun sosialisasi yang berkaitan dengan pengembangan BUM Kal akan disampaikan oleh Mugiyono selaku ketua pengurus BUM Kal, beliau mengatakan:

“kalo mengenai pelatihan atau pun sosialisasi, kami pengurus hanya melakukan diskusi rutin bersama Pemerintah Kalurahan. Disitu kami membahas program dan langkah untuk kedepannya, apalagi BUM Kal ini belum berjalan maka perlunya bertukar pemahaman satu sama lain. Seperti yang barusan ini kami bersama Pemerintah sedang mendiskusikan untuk kelanjutan program yang baru direncanakan, seperti program kelengkapan pertanian, dan juga pangkalan tabung gas. Rencananya akan menyediakan satu unit mobil untuk mengangkut usaha tabung gas serta untuk pengelolaan sampah” (*Hasil Wawancara 25 Maret 2024*).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan, bahwa Pengurus BUM Kal mengakui bahwa ini mereka belum menerima pelatihan atau sosialisasi formal dari Pemerintah Kalurahan. Dan sebagai pengantinya, mereka

melakukan diskusi secara rutin untuk membahas program ataupun langkah-langkah strategis yang akan diambil kedepannya. Dalam konteks *collaborative governance*, hal ini menekankan pada inklusivitas, partisipasi, transparansi, dan pemecahan masalah bersama. Yang mana melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan program hal tersebut membantu membuat keputusan lebih komprehensif dan diterima oleh semua pihak. Dari segi modal politik, kolaborasi ini memperkuat legitimasi pengurus BUM Kal dimata masyarakat, membangun jaringan dan aliansi yang solid, serta membuka akses kesumber daya dan dukungan yang lebih besar. Selanjutnya mengenai sosialisasi dan pelatihan dalam pengembangan BUM Kal akan disampaikan oleh Kaniyo selaku Lurah Wiladeq, beliau mengatakan;

“kami Pemerintah Kalurahan telah mengadakan pelatihan dan diskusi rutin bersama pengurus BUM Kal. Tujuan mengadakan pelatihan ini untuk memberi pemahaman yang mendalam mengenai tata kelola BUM Kal, dan optimalisasi potensi.apalagi untuk kepengurusan yang sekarang ini baru saja dibentuk maka mereka sangat perlu untuk diberikan pemahaman walaupun sekedar diskusi bersama. Kami memahami bahwa keberhasilan BUM Kal sangat bergantung pada kapasitas pengurusnya, sehingga kami berkomitmen untuk terus mendukung mereka dengan pelatihan yang berkelanjutan”(Hasil Wawancara 13 Maret 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, mengenai pelatihan dan diskusi rutin dengan pengurus BUM Kal mencerminkan prinsip *Collaborative Governance*, yang menekankan pentingnya partisipasi dan pembelajaran bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan memberikan pemahaman mendalam mengenai tatakelola dan optimalisasi potensi BUM Kal, hal ini dapat memastikan bahwa pengurus yang baru dibentuk memiliki kapasitas yang memadai dalam mengembangkan BUM Kal. Dari konteks modal politik, dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah kalurahan dalam memperkuat

legitimasi, dan membangun jaringan yang kuat, serta membuka akses kesumber daya dan dukungan yang lebih besar, dengan pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas tatakelola, namun juga memperkuat posisi politik pengurus untuk keberhasilan jangka Panjang BUM Kal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Emiliana selaku masyarakat Kalurahan Wiladeg atau sebagai pelaku usaha:

“Saya bukan warga asli Kalurahan Wiladeg; saya hanya menumpang untuk membuka usaha di sini. Usaha ini dikelola oleh Pemerintah Kalurahan Wiladeg, dan saya telah meminta izin untuk membuka usaha di tempat ini. Untuk biaya penyewaan tempat, kami harus membayar sebesar Rp 1.000.000 per tahun. Mengenai sosialisasi, saya kurang tahu karena saya bukan pelaku UMKM asli sini. Namun, saya berharap ada lebih banyak informasi serta sosialisasi yang bisa saya ikuti untuk mendukung usaha saya, meskipun saya bukan warga asli Wiladeg” (*Hasil Wawancara 25 Maret 20204*).

Dari jawaban informan diatas, mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi pelaku usaha yang bukan warga asli di Kalurahan Wiladeg. Meskipun sudah dan telah membayar sewa, pelaku usaha tersebut merasa kurang mendapatkan informasi mengenai sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah setempat. Dalam konteks *Collaborative Governance*, penting bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pendatang untuk terlibat dan mendapatkan akses informasi yang cukup. Yang mana hal tersebut dapat membantu memperkuat kolaborasi antara pemerintah kalurahan dan pelaku usaha lokal maupun pendatang.

Dalam konteks modal politik, keinginan pelaku usaha untuk lebih banyak informasi mengenai sosialisasi maupun pelatihan, mencerminkan kebutuhan akan dukungan kebijakan yang iklusif dari pemerintah kalurahan. Dengan meningkatkan akses informasi dan partisipasi bagi semua pelaku usaha dapat

memperkuat legitimasi dan kredibilitas kebijakan, dan meningkatkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. dengan demikian, hal tersebut dapat membantu pemerintah kalurahan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk membangun ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya akan disampaikan oleh Runi selaku Masyarakat Kalurahan Wiladeq atau pelaku usaha beliau mengatakan;

“Begini, tempat ini dikelola oleh Pemerintah Kalurahan, dan saya telah membuka usaha perdagangan sembako di sini selama hampir tiga tahun. Mengenai sosialisasi, kemungkinan ada, tetapi saya tidak pernah mengikutinya. Pernah ada sosialisasi mengenai bantuan khusus untuk masyarakat yang membuka usaha di sini, tetapi sampai sekarang belum ada kabar lebih lanjut, meskipun sudah hampir setahun. Kami sangat berharap ada tindak lanjut dari Pemerintah Kalurahan mengenai bantuan tersebut, karena banyak pelaku usaha yang membutuhkannya untuk mengembangkan usaha mereka” (*Hasil Wawancara 25 Maret 2024*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, mengindikasikan adanya kekurangan dalam komunikasi dan partisipasi yang efektif antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat atau pelaku usaha. Dalam konteks kolaborasi, pemerintah kalurahan harus lebih proaktif dalam melibatkan pelaku usaha dan memastikan bahwa informasi mengenai bantuan tersampaikan dengan jelas. Kurangnya partisipasi dan ketidakpastian mengenai bantuan mencerminkan kesenjangan dalam modal sosial, yang bisa diberpaiki dengan komunikasi dan transparansi yang baik.

Dalam konteks modal politik, ketidak pastian batuan hampir setahun dapat merusak kepercayaan terhadap pemerintah kalurahan. Pemerintah kalurahan menunjukkan komitmen dengan menindaklanjuti janji bantuan untuk memperkuat legitimasi dan dukungan, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan usaha lokal khususnya BUM Kal. Oleh karena itu,

Pemerintah Kalurahan dapat mengadakan sosialisasi yang lebih terstruktur dan terjadwal serta merencanakan sosialisasi secara berskala untuk memastikan bahwa informasi mengenai waktu dan tempat sosialisasi disebarluaskan dengan baik melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, surat langsung kepada masyarakat atau pelaku usaha dan melalui papan pengumuman. Selanjutnya mengadakan forum dan pertemuan rutin antara Pemerintah Kalurahan dan pelaku usaha untuk membahas ketubuhan serta masalah yang sedang dihadapi, hal ini dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan BUM Kal

Partisipasi aktif masyarakat merupakan landasan utama dalam pembangunan berkelanjutan. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program BUM Kal memastikan bahwa inisiatif yang dijalankan benar-benar memenuhi kebutuhan dan aspirasi lokal. Hal ini mendorong terciptanya rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap kesuksesan program tersebut. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan BUM Kal memberikan wawasan berharga tentang kebutuhan dan potensi lokal. Mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh komunitas mereka. Dengan demikian, partisipasi masyarakat membantu memastikan bahwa program-program yang dirancang lebih relevan dan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat tidak hanya terjadi dalam tahap perencanaan, akan tetapi dalam implementasi serta pemantauan program. Masyarakat dapat

berperan sebagai tenaga kerja, pengguna, dan bahkan sebagai pelanggan dari produk atau layanan yang ditawarkan oleh BUM Klaurahan dengan demikian, mereka secara tidak langsung telah mendukung keberhasilan dari operasional BUM Kal. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan lokal dan pengembangan BUM Kal, yakni melalui keterlibatan aktif, yang mana BUM Kal dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan lokal, memperkuat ekonomi komunitas, serta menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat di tingkat kalurahan tercermin dari partisipasi aktif seseorang atau kelompok tertentu dalam proses, sosial, politik, dan ekonomi, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keterlibatannya secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menelaah lebih dalam mengenai Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan BUM Kal akan disampaikan oleh Kaniyo selaku Lurah Kalurahan Wiladeg, beliau mengatakan;

“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengembangan BUM Kal ini, dan kami secara rutin mengadakan musyawarah desa untuk mengidentifikasi potensi dan masalah yang ada di kalurahan kami. Masyarakat kalurahan dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, mulai dari pemilihan jenis usaha hingga pengawasan dan evaluasi kegiatan usaha. Dengan keterlibatan mereka, BUM Kal bisa kembali berjalan. Misalnya, kami telah merencanakan usaha pengelolaan di sektor pertanian dan mengundang perwakilan kelompok tani, tokoh masyarakat, serta ibu-ibu PKK untuk memberikan masukan. Dukungan serta partisipasi masyarakat sangat kami harapkan untuk keberlanjutan usaha yang kami rencanakan ini” (*hasil wawancara 13 maret 2024*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam pengembangan BUM Kal, seperti yang dilihat dari kegiatan rutin musyawarah desa untuk mengidentifikasi potensi dan masalah dikalurahan. Masyarakat terlihat aktif dari tahap perencanaan hingga pengambilan keputusan. Mencakup pemilihan jenis usaha

serta pengawasan dan evaluasi kegiatan usaha, keterlibatan ini memastikan bahwa BUM Kal tetap relevan dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Sebagai contoh, dalam perencanaan usaha disektor pertanian, perwakilan kelompok tani, tokoh masyarakat, dan ibu-ibu PKK diundang untuk memberikan masukan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap langkah yang diambil oleh BUM Kal sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi masyarakat untuk menjamin keberlanjutan serta kesuksesan usaha yang telah direncanakan. Selanjutnya mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUM Kal akan disampaikan oleh Nurtika Fitria Reni selaku Carik, beliau mengatakan bahwa;

“Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap kesuksesan BUM Kal ini. Dengan melibatkan masyarakat, kami dapat memastikan bahwa usaha yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di kalurahan kami. Selain itu, masyarakat yang merasa memiliki usaha ini cenderung lebih mendukung dan berkontribusi secara aktif, baik dalam bentuk tenaga, ide, maupun modal” (*Hasil Wawancara 13 Maret 2024*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk kesuksesan BUM Kal. Dengan melibatkan masyarakat hal ini dapat memastikan bahwa usaha yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Ini juga dapat meningkatkan rasa memiliki dan dukungan terhadap BUM Kal, serta memperkuat modal sosial dalam bentuk hubungan, norma sosial, dan saling percaya dikomunitas.

Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat menciptakan rasa memiliki yang kuat terhadap BUM Kal. Ketika masyarakat merasa bagian dari keberhasilan tersebut, maka mereka akan bersedia mendukung dan juga berkontribusi secara aktif, baik dengan ide, tenaga ataupun modal. Hal ini membuka peluang untuk kerja sama yang lebih era antara BUM Kal dan komunitas setempat, yang pada akhirnya dapat memperkuat hubungan antara keduanya serta memberikan

manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUM Kal akan disampaikan oleh Tri Hardono selaku ketua BPKal Kalurahan Wiladeg, beliau mengatakan;

“Sebagai wakil dari masyarakat, kami selalu mendorong keterlibatan aktif warga dalam setiap kegiatan BUM Kal. Kami juga menerima dan menampung aspirasi serta keluhan mereka untuk kemudian disampaikan kepada pengurus BUM Kal dan Pemerintah Desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat, kami sangat terbantu karena mereka tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga mitra dalam pengembangan usaha. Banyak ide inovasi yang muncul dari masyarakat yang kemudian kami usahakan untuk diimplementasikan. Misalnya, program perlengkapan pertanian merupakan ide yang diberikan oleh masyarakat. Sebelumnya, masyarakat mengeluh karena untuk memenuhi kebutuhan di sektor pertanian, mereka harus pergi ke luar kalurahan untuk membeli pupuk atau alat-alat pertanian. Oleh karena itu, kami bersama Pemerintah Kalurahan dan pengurus BUM Kal memutuskan untuk menambah unit usaha perlengkapan pertanian. Langkah ini diharapkan dapat menjadi peluang untuk keberlanjutan BUM Kal dan meningkatkan perekonomian lokal” (*Hasil Wawancara 25 Maret 2024*).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa pentingnya peran aktif masyarakat dalam Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal), dan dampaknya terhadap pengembangan usaha serta ekonomi lokal. Dengan melibatkan masyarakat ini dapat memastikan bahwa usaha yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi kalurahan. Hal ini tidak hanya memperkuat modal sosial melalui hubungan yang kuat, tetapi juga mendukung pendekatan *Collaborative Governance* dengan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama secara efektif Selanjutnya akan disampaikan oleh Mugiyono selaku ketua Pengurus BUM Kal Kalurahan Wiladeg, beliau mengatakan;

“Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan BUM Kal ini. Saat ini, BUM Kal belum beroperasi, sehingga dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat sangat diperlukan agar BUM Kal dapat beroperasi sesuai dengan rencana. Dukungan ini penting untuk mengelola

potensi desa dan meningkatkan perekonomian lokal” (*Hasil Wawancara 25 Maret 2024*).

Dari jawaban informan diatas, menunjukan kesadaran akan peran krusial masyarakat dalam menjaga keberlanjutan BUM Kal. Tanpa adanya dukungan dan pasrtisipasi aktif dari stakeholder dan masyarakat, BUM Kal akan kesulitan dalam memulai operasionalnya dan juga mempertahankan keberlanjutan. Namun selain pasrtisipasi masyarakat, dukungan dari stakeholder lainnya seperti pemerintah kalurahan, Lembaga keuangan atau Lembaga lainnya dan sector swasta juga pentin dalam memastikan keberlanjutan BUM Kal. Kolaborasi antara pihak ini dapat memberikan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk membangun dan menjaga operasional BUM Kal.

Dengan demikian, melalui partisipasi masyarakat, BUM Kal dapat membangun sinergi yang kuat dengan komunitas lokal. Ini menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama atas kesuksesan BUM Kal. Dimana fokus utama dari BUM Kal adalah untuk mengelola potensi desa guna meningkatkan perekonomian lokal. Maka dari itu, keberlanjutan BUM Kal tidak hanya bermanfaat bagi Lembaga itu sendiri, tetapi juga bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Selanjutnya akan disampaikan oleh pak Sumarno selaku tokoh masyarakat, beliau mengatakan;

“Secara prinsip, Pemerintah telah berupaya melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan BUM Kal melalui musyawarah desa. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat belum merata. Sebagian besar masyarakat lebih mempercayakan penyampaian aspirasi mereka kepada RT/RW. Beberapa masyarakat tidak secara aktif menginisiasi partisipasi mereka dalam musyawarah, bukan karena ketidakpedulian, melainkan karena kepercayaan kepada RT/RW sebagai wakil mereka. Di sisi lain, pemerintah perlu lebih proaktif dalam memfasilitasi ruang partisipasi yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat” (*Hasil Wawancara 25 Maret 2024*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan, bahwa meskipun pemerintah kalurahan memiliki upaya melalui musyawarah dalam pengembangan BUM Kal, hal ini terbilang belum merata. Yang mana mayoritas masyarakat lebih mengandalkan RT/RW sebagai wakil mereka, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan norma sosial ditingkal lokal. Pemerintah perlu lebih aktif dalam menciptakan ruang partisipasi yang inklusif agar semua lapisan masyarakat dapat terlibat secara aktif dan aspirasi mereka dapat terwakili dalam keputusan terkait BUM Kal. Selanjutnya menurut Noviana selaku masyarakat Kalurahan Wiladeg, beliau mengatakan;

“Menurut pendapat saya, keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan Badan Usaha ini sangat penting. Sebagai anggota masyarakat yang akan terkena dampak dari keputusan tersebut, kami harus memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan. Sejauh yang saya amati, proses musyawarah berjalan cukup baik. Pemerintah mengadakan pertemuan terbuka untuk mendiskusikan BUM Kal, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kalurahan. Oleh karena itu, saya sangat mendukung upaya pengembangan kembali BUM Kal ini” (*Hasil Wawancara 25 Maret 2024*).

Dari jawaban informan diatas, menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Badan Usaha Miliki Kalurahan. Sebagai anggota masyarakat yang akan terpengaruh oleh keputusan tersebut, partisipasi dalam pengambilan keputusan sangatlah penting. Proses musyawarah yang berlangsung hingga saat ini dinilai cukup baik, dengan pemerintah mengadakan pertemuan terbuka untuk membahas BUM Kal.

Badan Usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kalurahan, sehingga mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Dukungan ini tidak hanya menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat, tetapi juga menunjukkan kepercayaan bahwa BUM Kal dapat memberikan manfaat nyata

bagi kesejahteraan mereka. Selanjutnya dalam keterlibatan aktif masyarakat, Pemerintah Kalurahan harus mampu mendengarkan kritik maupun ide dari masyarakat. Sebagai aktor penting dalam sistem pemerintahan, Pemerintah memiliki peran krusian dalam menampung dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Masyarakat yang terlibat secara langsung akan memberikan pandangan yang berharga untuk pengembangan BUM Kal. Dengan mendengarkan kritik, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Semantara itu, ide yang diberikan masyarakat dapat menjadi sumber inovasi yang membantu meningkatkan kinerja dan relevansi BUM Kal. Keterlibatan masyarakat yang aktif, didukung dan direpons pemerintah yang terbuka dan tanggap. Hal ini juga memastikan bahwa BUM Kal berkembang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah yang mendengarkan lingkungan yang mendukung kolaborasi, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan BUM Kal. Yang akan disampaikan oleh Mugiyono selaku Ketua BUM Kal Kalurahan wiladeg, beliau mengatakan;

“Menurut pengalaman kami, Pemerintah Kalurahan telah cukup responsif terhadap kritik dan masukan kami mengenai pengembangan BUM Kal. Mereka membuka saluran komunikasi yang baik untuk menerima masukan dari masyarakat atau pihak lainnya. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu, kami sebagai pengurus BUM Kal mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Kalurahan untuk membahas kritik terkait proses perizinan yang dianggap rumit. Pemerintah Kalurahan merespons dengan membentuk tim khusus untuk meninjau ulang prosedur perizinan tersebut. Jika terjadi kesenjangan atau ketidaksepakatan, Pemerintah Kalurahan biasanya mengadakan pertemuan lanjutan atau forum diskusi dengan semua pihak terkait untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini menunjukkan respons yang baik dari Pemerintah Kalurahan dalam menanggapi masukan terkait pengembangan BUM Kal” (*Hasil Wawancara 25 Maret 2024*).

Hal serupa juga disampaikan oleh Emilia selaku masyarakat Kalurahan Wiladeg atau sebagai pelaku usaha, beliau mengatakan;

“Menurut pengalaman saya, Pemerintah Kalurahan sangat responsif terhadap kritik dan masukan yang kami berikan terkait tempat usaha ini. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu, kami mengalami kerusakan pada keramik lantai di tempat usaha. Setelah saya melaporkan masalah tersebut kepada Pemerintah Kalurahan, mereka segera merespons. Pemerintah Kalurahan langsung turun tangan untuk memperbaiki kerusakan tanpa meminta biaya tambahan dari kami sebagai pengusaha. Tindakan cepat dan responsif dari Pemerintah Kalurahan membuat kami merasa didengar dan dihargai sebagai bagian dari komunitas ini” (*Hasil Wawancara 25 Maret 2024*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dalam konteks modal sosial yang mana pemerintah kalurahan responit terhadap masukan dan kritikan dari masyarakat terkait tempat usaha. Respons cepat dan tindakan langsung dalam memperbaiki kerusakan tanpa biaya tambahan mencerminkan adanya hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan dan saling mengdukung kerja sama yang efektif dan menciptakan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.

Oleh karena itu, keberadaan BUM Kal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan produk lokal, melainkan juga mempererat jalinan sosial antara warga dan mendukung upaya pelestarian lingkungan. Dengan memperhatikan beragam harapan dan aspirasi dari masyarakat, BUM Kal bertekad untuk menjadi mitra yang kuat bagi warga, memberikan dampak positif keberlanjutan serta berperan aktif dalam memajukan kesejahteraan serta keberlanjutan kalurahan ini. Seperti yang disampaikan oleh Kaniyo selaku Lurah:

“Dalam pengembangan BUM Kal ini masyarakat sangat antusias terhadap keberadaan BUM Kal ini. Meskipun kami baru akan memulai kembali operasional BUM Kal, kami sudah menerima berbagai harapan dari mereka.

Beberapa warga telah menyampaikan harapan agar BUM Kal dapat membawa perubahan positif dalam hal pemberdayaan lokal dan membuka peluang kerja baru. Selain harapan terkait aspek ekonomi, ada juga harapan bahwa BUM Kal dapat berperan dalam memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan di antara masyarakat” (*Hasil Wawancara 25 Maret 2024*).

Dari jawaban informan diatas, mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap kehadiran BUM Kal dan harapan besar akan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan lokal. Dengan menyebutkan bahwa sebagian warga berharap BUM Kalirahan dapat mengubah secara positif pemberdayaan ekonomi dan memberikan kesempatan kerja baru, hal ini menunjukkan pentingnya BUM Kal dalam memperkuat struktur ekonomi lokal dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu juga, aspirasi akan peran BUM Kal dalam memperkuat keterikatan sosial dan kebersamaan menegaskan bahwa masyarakat melihat BUM Kal bukan hanya sebagai entitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai platform untuk membangun komunitas yang lebih solid dan bersatu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Runi selaku pelaku usaha diKalurahan Wiladeg, beliau mengatakan;

“Menurut saya, keberadaan Badan Usaha ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi. Badan Usaha dapat menjadi motor penggerak bagi pengembangan usaha kecil dan menengah di kalurahan ini. Dengan adanya Badan Usaha ini, diharapkan tercipta peluang-peluang baru bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan produk dan layanan mereka, serta meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas. Selain itu, saya berharap Badan Usaha ini dapat mempromosikan dan mendukung produk-produk lokal, sehingga dapat meningkatkan citra dan daya saing produk-produk lokal di pasar yang lebih besar” (*Hasil Wawancara 25 Maret 2024*).

Hal serupa juga disampaikan oleh Noviana selaku masyarakat Kalurahan Wiladeg, beliau mengatakan;

“Jadi menurut saya dengan adanya keberadaan BUM Kal ini sangat penting dan menjanjikan bagi pengembangan ekonomi dikalurahan kami. Kami sangat mendukung inisiatif ini karena melihat potensi besar dalam memberdayakan UMKM yang ada. Dengan adanya BUM Kal ini, saya

berharap UMKM disini akan mendapatkan dukungan yang besar dalam meningkatkan kualitas produk mereka. selain itu, dengan adanya BUM Kal ini juga dapat menjadi sarana untuk mengatasi beberapa kendala yang sering dihadapi oleh UMKM, baik masalah akses pasar, pembiayaan, ataupun keterampilan” (*Hasil Wawancara 25 Maret 2024*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan adanya dukungan terhadap inisiatif ini mencerminkan modal sosial berupa kepercayaan dan hubungan yang kuat antara pemerintah, BUM Kal, dan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemeberdayaan UMKM dengan memberikan dukungan dalam meningkatkan kualitas produk, mengatasi kendala akses pasar, pembiayaan dan pengembangan.

Dengan adanya BUM Kal sebagai sarana kolaborasi, diharapkan dapat terciptanya lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial yang kuat dan praktik *Collaborative Governance* dapat berkontribusi singnifikan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

C. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Pengembangan

BUM Kal

Kolaborasi akan lebih mudah jika semua pihak memiliki tujuan yang sejalan dan mendukung satu sama lain. Misalnya, jika tujuan BUM adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, maka baik pihak politik maupun pihak sosial harus memiliki komitmen terhadap pencapaian tujuan tersebut. Oleh sebab itu, kolaborasi yang efektif membutuhkan kesediaan dari semua pihak yang terkait untuk saling berbagi sumber daya seperti pengetahuan, jaringan, dana, dan keahlian. Dengan berbagai sumber daya tersebut, setiap pihak dapat saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam mencapai

tujuan kolaborasi. Misalnya, pihak politik dapat memberikan dukungan berupa finansial dan juga kebijakan, sedangkan pihak sosial dapat menyediakan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan anspirasi masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi menjadi lebih kokoh dan berpotensi mencapai yang diharapkan bagi semua pihak yang terlibat, seperti yang disampaikan oleh Mugiyono selaku ketua pengurus BUM Kal Wiladeg:

“Dalam pengembangan pastinya perlu kerja sama dengan pihak-pihak terkait dan tidak bisa untuk kita kerjakan atau selesaikan sendiri, maka dari itu kami dari pihak pengurus BUM Kal dan Pemerintah Kalurahan rencananya akan berkerja sama dengan BPD, PAM Dus, tokoh masyarakat, dan kelompok tani, untuk mendukung pengembangan BUM Kal ini” (*Hasil Wawancara 25 Maret 2024*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan kesadaran dari pihak pengurus dan Pemerintah Kalurahan akan pentingnya kolaborasi dalam pengembangan BUM Kal. Dalam konteks *collaborative governance*, rencana kerja sama antara pengurus BUM Kal, pemerintah kalurahan BPD, Pam Dusun, tokoh masyarakat, dan kelompok tani merupakan perinsip partisipatif dan kolaboratif yang enensial untuk keberhasilan proyek bersama. Dengan adanya *collaborative governance* dapat mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai keputusan yang lebih iklusif dan transparan. Kerja sama ini akan membangun kepercayaan, meningkatkan komitmen dan memastikan bahwa perspektif dan kepentingan terwakili dalam pengembangan BUM Kal. Selanjutnya, dalam pengembangan BUM Kal pastinya terdapat faktor pendukung untuk keberlanjutan operasionalnya. Seperti yang disampaikan oleh Kaniyo selaku Lurah Wiladeg:

“kami merasakan bahwa kerja sama dan dukungan dari semua pihak sangat penting dan ini adalah salah satu faktor yang mendukung dalam menjalankan BUM Kal. Kami memiliki program-program yang telah

dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan. Seperti program yang telah kami rencanakan yakni penambahan unit usaha dengan harapan agar dapat mencapai keberlanjutan BUM Kal. Selain itu, adanya kebijakan dan regulasi, artinya kan dengan adanya kebijakan ini bisa lebih struktur dalam mengelola BUM Kal ini” (*Hasil Wawancara 13 Maret 2024*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan pentingnya kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak terkait dalam menjalankan BUM Kal. Kerja sama yang kuat antara anggota BUM Kal, Pemerintah Kalurahan, dan pihak terkait lainnya dapat memperkuat kapasitas dan sumber daya yang tersedia untuk BUM Kal. Dalam prespektif *collaborative governance*, kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak merupakan faktor penting. Keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam perose pengambilan keputusan dan implementasi program. Hal ini dapat menciptakan rasa memiliki bersama dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya program yang direncanakan seperti penambahan unit usaha, serta kebijakan dan regulasi hal ini menunjukkan adanya pendekatan terstruktur dan strategis dalam pengelolaan BUM Kal.

Dengan memperkuat legitimasi dan stabilitas tersebut mencerminkan adanya dukungan politik yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan dan program. Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan dan mengurangi resistensi terhadap perubahan, sehingga dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam keberlanjutan program-program yang dijalankan oleh BUM Kal. Untuk menelaah lebih lanjut terkait faktor pendukung dalam pengembangan BUM Kal, ini juga akan disampaikan oleh Mugiyono selaku ketua BUM Kal Wiladeg:

“Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung utama dalam pengembangan BUM Kal. Salah satunya adalah peran BUM Kal sebagai

penggerak dalam meningkatkan perekonomian, sehingga perlu untuk dikembangkan. Selain itu, faktor pendukung lainnya adalah adanya saling kerja sama dan rasa kepedulian dalam mengembangkan program-program yang telah dirancang sebelumnya secara bersama-sama. Kami sangat menghargai adanya kerja sama dan rasa kepedulian yang kuat diantara anggota BUM Kal, Pemerintah Kalurahan, Masyarakat dan berbagai pihak terkait lainnya. Dengan adanya kolaborasi yang solid ini, kami yakin bahwa BUM Kal akan semakin berkembang dan dapat memberikan dampak yang signifikan” (*Hasil Wawancara 25 Maret 2024*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan, kesadaran akan peran strategi BUM Kal dalam menggerakkan perekonomian. Dengan menjadi motor penggerak, BUM Kal tidak hanya memciptakan peluang ekonomi baru tetapi juga meningkatkan daya beli dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pengembangan BUM Kal menjadi prioritas karena potensinya untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi.

Dalam konteks *collaborative governance*, pengembangan BUM Kal dapat dijadikan sebagai penggerak ekonomi yang didukung oleh kerja sama dan rasa keperdulian bersama, hal ini merupakan langkah yang tepat dalam mengembangkan BUM Kal. Keterlibatan aktif dari pemerintah kalurahan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya mencerminkan prinsip partisipasi inklusif dan transparan yang kuat untuk mencapai kesuksesan bersama.

Kolaborasi yang kuat dan keperdulian yang tinggi di anatar anggota BUM Kal dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperkuat jaringan sosial dan membangun kepercayaan. Modal sosial ini penting untuk mendukung pelaksanaan program mengatasi hambatan dan menacapai keberlanjutan. Dengan dukungan dan kolaborasi ini BUM Kal memiliki potensi besar untuk berkembang dan memberikan dampak singnifikan bagi kesejahteraan

masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mugiyono selaku ketua Pengurus BUM Kal Wiladeg, beliau mengatakan:

“Partisipasi masyarakat ini juga menjadi faktor pendukung dalam berjalannya BUM Kal, artinya kan unit usaha yang kita jalankan atau di programkan tersebut sesuai apa tidak dengan kebutuhan masyarakat, maka dari itu anspirasi serta keterlibatan masyarakat sangatlah berpengaruh. Seperti yang dimusyawarahkan bersama ada beberapa anspirasi dari masyarakat untuk menyediakan bahan untuk pertanian, itu seperti pupuk serta alat, oleh sebab itu dari pengurus BUM Kal rencananya akan membuat unit usaha BUM Kal”(*Hasil Wawancara 25 Maret 2024*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung operasional BUM Kal. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, BUM Kal dapat memastikan bahwa unit usaha yang dijalankan atau diprogramkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Hal ini menujukkan pendekatan yang inklusif dan berbasis masyarakat dalam pengelolaan BUM Kal.

Dalam konteks *collaborative governance*, partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan BUM Kal. Keterlibatan aktif masyarakat memastikan bahwa program dan unit usaha yang dijalankan BUM Kal sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Proses musyawarah yang melibatkan masyarakat dalam menentukan kebutuhan mencerminkan prinsip kolaborasi dan partisipasi yang penting dalam *collaborative governance*. Seperti yang dijelaskan oleh Tri Hardono selaku ketua BPD Kalurahan Wiladeg:

“Dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, proses tidak dilakukan secara langsung atau individu. Aspirasi masyarakat dikumpulkan terlebih dahulu melalui Musyawarah Dusun. Setelah ditemukan kesamaan pendapat, aspirasi tersebut akan disampaikan oleh tokoh masyarakat atau ketua RT pada pertemuan Musyawarah Kalurahan. Selanjutnya, aspirasi tersebut akan didiskusikan bersama untuk menentukan kelayakannya sebagai unit usaha. Menurut saya, partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap

keberlanjutan BUM Kal. Sumbangan berupa pengetahuan dan pendapat masyarakat menjadi kunci dalam menentukan arah pengembangan BUM Kal” (*Hasil Wawancara 25 Maret 2024*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menyoroti proses sistematis dan partisipatif dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat untuk mendukung pengembangan BUM Kal. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah dan program BUM Kal, serta menunjukkan adanya mekanisme yang terstruktur untuk mengumpulkan, menyampaika, dan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat. Dalam pendekatan pengumpulan aspirasi melalui musyawarah dusun menunjukkan adanya modal sosial yang efektif untuk memperkuat kepercayaan dari pasrtisipasi aktif masyarakat, akan tetapi memastikan bahwa keputusan mengenai pembentukan unit usaha tersebut didasarkan pada consensus dan diskusi bersama. Selanjutnya terkait partisipasi masyarakat juga disampaikan oleh Kaniyo selaku Lurah Wiladeg

“BUM Kal ini kan dibentuk untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat kalurahan, maka masyarakat juga berhak terlibat didalamnya. Dalam arti mereka disini dapat menyampaikan aspirasi serta pendapat mengenai perkembangan dan keberlanjutan program BUM Kal. Bentuk partisipasi masyarakat yakni pembayaran pajak terhadap unit usaha yang ada, seperti PAM Dus. Dan PAM Dus ini sudah ada ditiga padukuhan, melalui dukungan finansial dan sumber daya dari masyarakat ini merupakan partisipasi aktif dari masyarakat. oleh karena itu, pasrtisipasi masyarakat sangat berperan dalam pengembangan serta pembangunan dikalurahan” (*Hasil Wawancara 13 Maret 2024*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukan bahwa masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam pengembangan BUM Kal, karena BUM Kal dibentuk untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. dalam konteks modal sosial seperti kepercayaan dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi landasan pendting dalam mendukung keberlanjutan BUM Kal. Dukungan finansial dan sumber daya yang diberikan oleh masyarakat

menunjukkan komitmen dan kontribusi dalam proses pembangunan ekonomi lokal. Namun keterlibatan partisipasi aktif masyarakat tidak hanya merupakan aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi politik signifikan dalam membangun hubungan yang solid antara pemerintah kalurahan dan masyarakat. selanjutnya akan disampaikan oleh Tri Hardono selaku ketua BPD Kalurahan Wiladeg

“salah satu kendala yang kami hadapi dalam pengembangan BUM Kal adalah kurangnya SDM. Meskipun BUM Kal sudah berdiri lama, namun belum beroperasi karena kami kesulitan menemukan orang yang ingin berjuang bersama dalam mengembangkannya. Selain itu, kami juga menghadapi kendala dalam keterbukaan pemerintah dalam mengelola BUM Kal. Kami merasa bahwa pemerintah masih kurang transparansi dalam hal finansial dan pengelolaan permodalan. Hal ini membuat kami sulit untuk memahami bagaimana dana diinvestasikan dan bagaimana kinerja pengelolaan secara keseluruhan. Kemudian, kendala lainnya adalah kurangnya relasi yang memadai. Sebagai contoh, unit usaha fotocopy dan ATK yang pernah beroperasi sebelumnya, kini telah vakum. Lokasi usaha tersebut sangat mendukung yakni dekat dengan sekolah, rumah sakit, dan kantor polisi. Namun, tanpa dukungan dan kerjasama yang cukup dari pemerintah dan pihak terkait lainnya, sulit bagi kami untuk menjalankan unit usaha tersebut dengan sukses” (*Hasil Wawancara 25 Maret 2024*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa kendala utama dalam pengembangan BUM Kal adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan bersedia berpartisipasi dalam pengembangan BUM Kal. Meskipun BUM Kal telah lama ada dalam waktu yang cukup lama, kesulitan dalam menarik individu yang ingin berkontribusi secara aktif dapat menghambat kemajuan operasional serta pengembangan BUM Kal tersebut. Kendala selanjutnya, terlihat bahwa kurangnya keterbukaan atau transparansi dari pemerintah dalam mengelola BUM Kal menyulitkan untuk memahami bagaimana dana diinvestasikan dan bagaimana kinerja pengelolaan secara keseluruhan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan kekhawatiran

dari pihak-pihak terkait, serta menghambat kerjasama yang efektif antara BUM Kal dan Pemerintah. Kendala lainnya adalah kurangnya relasi yang memadai dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya. Sebagai contoh, terdapat unit usaha fotocopy dan ATK menghadapi kesulitan dalam beroperasi kerena kurangnya dukungan dan kerjasama dari Pemerintah Kalurahan dan pihak terkait lainnya. Lokasi yang startegis tidak dapat dimaksimalkan tanpa dukungan yang memadai dari pihak terkait. Selanjutnya mengenai faktor penghambat, juga disampaikan oleh Magiyono selaku ketua BUM Kal Kalurahan Wiladeg:

“kendala utama yang kami hadapi dalam pengembangan BUM Kal adalah masalah perizinan. Tanpa surat perizinan yang jelas dan lengkap, kami mengalami kesulitan dalam menjalankan BUM Kal. Proses perizinan yang rumit sering kali memperlambat langkah-langkah kami dalam memulai operasi. Contohnya, kami ingin membuka usaha kecil-kecilan di sektor pertanian untuk meningkatkan pendapatan kalurahan, tetapi tanpa izin yang tepat, kami tidak dapat mengakses sumber daya atau pasar yang dibutuhkan. Hal ini membuat proses pengembangan usaha menjadi terhambat. Selain itu, kendala lainnya adalah terkait penyertaan modal dan SDM. Kami mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal yang cukup untuk memulai atau mengembangkan BUM Kal. Hambatan yang selanjutnya itu kurang adanya kerjasama dengan pihak lain, pemerintah kurang membuka relasi akibatnya sulit dalam menjalankan program yang telah direncanakan” (*Hasil Wawancara 25 Maret 2024*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa dalam pengembangan BUM Kal menghadapi beberapa kendala utama yang cukup singnifikan. Dalam konteks modal sosial kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan BUM Kal tersebut menyoroti tantangan politik yang signifikan. Tanpa adanya perizinan yang jelas dan lengkap, BUM Kal menghadapi hambatan dalam operasionalnya secara legal dan mengakses sumber daya yang diperlukan untuk keberhasilan BUM Kal. Hal ini mencerminkan pentingnya dukungan politik dan administrasi yang kuat dari pemerintah kalurahan.

Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Kaniyo selaku Lurah Kalurahan Wilade, beliau mengatakan:

“Kami mengalami kesulitan dalam mencari tenaga yang ingin berkerja sama dengan BUM Kal. Kami memerlukan orang-orang yang memiliki komitmen dan keterampilan dalam mendukung operasional BUM Kal. Selanjutnya hambatan yang kami alami yakni sarana yang belum lengkap, dan sebenarnya kami dari pemerintah telah memberikan fasilitas berupa sewa ruko untuk dikelola BUM Kal. Namun, kendala muncul karena fasilitas di dalam ruko tersebut belum lengkap, seperti masalah dengan pasokan listrik yang tidak stabil. Hal ini menghambat kemampuan BUM Kal untuk menyediakan layanan yang optimal. Selain itu, kendala lainnya adalah kekurangan dana, yang mana ini menjadi hambatan besar dalam operasional BUM Kal. Tanpa adanya dana yang memadai BUM Kal tidak dapat beroperasi secara efektif. Contohnya kemarin, BUM Kal mencoba mengoperasikan unit usaha fotocopy dan ATK. Namun, operasionalnya tidak berjalan lancar dan tidak sesuai harapan karena kekurangan dana untuk mendapatkan jasa yang diperlukan. Ini mengindikasikan bahwa tanpa dana yang cukup, BUM Kal tidak dapat mengatasi tantangan operasional dan akhirnya harus vakum” (*Hasil Wawancara 13 Maret 2024*).

Dari jawaban informan diatas, menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama adalah kesulitan dalam memperoleh surat perizinan yang jelas dan lengkap. Proses ini sering rumit dan memakan waktu, menghambat BUM Kal dalam memulai operasionalnya. Tanpa surah izin yang tepat, BUM Kal kesulitan mengakses sumber daya dan pasar yang diperlukan, seperti dalam contoh usaha kecil disektor pertanian, menghalangi kemampuan mereka untuk memulai. Kendala selanjutnya, keterbatasan modal, hal ini membatasi implementasi program-program yang direncanakan. Kesulitan dalam mencari SDM yang berkualitas juga menjadi tantangan dalam menjalankan operasional BUM Kal.

Selanjutnya, kurangnya kerjasama dengan pihak lain, terutama Pemerintah, juga menjadi kendala yang singnifikan. Keterbatasan relasi dan dukungan dapat menghambat kemampuan BUM Kal untuk mendapatkan sumber daya

tambahan yang diperlukan. Tanpa dukungan yang cukup, implementasi program-program BUM Kal menjadi terhambat. Oleh sebab itu, perlunya upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut oleh pihak terkait untuk keberlanjutan pengembangan BUM Kal. Untuk menelaah lebih jauh upaya dalam menyelesaikan hambatan atau masalah dalam pengembangan BUM Kal akan disampaikan oleh Mugiyono selaku ketua BUM Kal Kalurahan Wiladeg, beliau mengatakan;

“Dalam menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan BUM Kal, kami bersama Pemerintah Kalurahan mengambil beberapa strategi. Salah satunya yaitu penyusunan Rencana Program Kerja (RPK), yang mana kami telah merencanakan beberapa program yang akan dijadikan unit usaha BUM Kal. Yakni yang bergerak pada bidang pertanian, kami akan menyediakan sarana perlengkapan pertanian dan perternakan, ATK, fotocopy, penjualan pulsa dan penjualan gas, serta kami akan berkerja sama dengan Pam Dusun. dengan adanya program-program yang telah kami rencanakan ini merupakan upaya bersama untuk keberlanjutan BUM Kal” (*Hasil Wawancara 25 Maret 2024*).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Kaniyo selaku Lurah Kalurahan Wiladeg, beliau mengatakan;

“Kendala utama yang kami hadapi ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola usaha. Banyak masyarakat yang belum terbiasa dengan konsep bisnis modern dan menajemen keuangan yang baik. Kami telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan ini salah satunya yaitu mengadakan pelatihan untuk memberikan pemahaman yang relevan terkhususnya untuk pengurus yang baru terbentuk sekarang ini. Salah satu langkah strategi yang direncanakan adalah dengan menambahkan unit usaha baru, terutama dibidang pertanian yang akan dibentuk unit usaha berupa penyediaan kelengkapan pertanian. Diskusi telah dilakukan antara pengurus BUM Kal dan Pemerintah Kalurahan, dan mereka yakin bahwa dengan menyediakan pupuk serta alat-alat pertanian, mereka dapat mendukung petani lokal untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Langkah selanjutnya adalah penyertaan modal dalam implementasi rencana yang telah disepakati tersebut, dengan alokasi dana sebagai modal awal untuk pembukaan unit usaha kelengkapan pertanian. Melalui strategi ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi yang singnifikan dalam mengembangkan kembali BUM Kal dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat” (*Hasil Wawancara 13 Maret 2024*).

Berdasarkan jawaban informan diatas, menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan telah mengupayakan berbagai strategi untuk mengatasi kendala dalam pengembangan BUM Kal. Dalam satunya adalah mengadakan pelatihan dan sosialisasi rutin untuk pengurus serta pihak terkait lainnya. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan serta pengetahuan masyarakat dalam menajemen bisnis dan keuangan. Mengingat tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu juga, pemerintah akan menjalin kerja sama dengan pihak lainnya seperti Lembaga keuangan dll.

Hal ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan operasional BUM Kal tersebut. Kerja sama antara Pemerintah Kalurahan, pengurus BUM Kal, dan pihak lainnya merupakan kunci kesuksesan dalam menjalankan rencana yang ada. Upaya terakhir yang dilakukan adalah mencakup program-program kegiatan BUM Kal untuk memastikan operasional yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan yang diterapkan bersifat holistic dan kolaboratif, dengan fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan finansial yang berkelanjutan.

Selanjutnya menurut Tri Hardono selaku ketua BPD Kalurahan Wiladeg mengatakan:

“Tentu dalam mengembangkan kembali BUM Kal yang cukup lama mengalami kevakuman atau tidak beroperasi, kami di BPKal berkerja sama dengan Pemerintah Kalurahan dan memiliki beberapa strategi untuk keberlanjutan BUM Kal. Salah satu langkah yang kami ambil adalah menyediakan fasilitas berupa ruko yang dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan untuk dikelola oleh BUM Kal. Jadi, ruko ini adalah asset milik Pemerintah Kalurahan yang belum digunakan secara optimal. Kami melihat potensi besar dari BUM Kal, sehingga kami memutuskan untuk memfasilitasi mereka dengan ruko ini. Harapanya, BUM Kal dapat mengelola usaha yang bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan saat ini, kami sedang dalam tahap perencanaan dengan pengurus BUM Kal. Beberapa ide yang sedang dibahas termasuk membuka unit usaha

perlengkapan pertanian seperti pupuk, alat, dll. Ide selanjutnya, itu pangkalan gas dan pengelolaan sampah. Kami juga terbuka terhadap ide-ide baru yang mungkin muncul dari masyarakat ataupun pengurus BUM Kal. Untuk keberlanjutan usaha ini dalam jangka Panjang. Kami juga masih dalam tahap menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan pihak lainnya untuk mendukung pengembangan usaha ini”(*Hasil Wawancara 25 Maret 2024*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa kerjasama antara BPKal dan Pemerintah Kalurahan dalam menyediakan fasilitas berupa ruko untuk BUM Kal merupakan penerapan *Collaborative Governance*. Yang mana kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Dengan melibatkan pengurus BUM Kal dan masyarakat dalam perencanaan, mereka dapat menerapkan inklusivitas dan partisipasi, hal ini merupakan prinsip utama dari *Collaborative Governance*.

Dalam konteks modal politik, langkah BPKal dan pemerintah kalurahan untuk mengaktifkan kembali BUM Kal melalui fasilitas ruko dan rencana usaha baru, dengan hal ini dapat memperkuat legitimasi mereka dimata masyarakat. tindakan ini menunjukkan komitmen terhadap pembangunan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan membuka diri terhadap ide-ide baru, dapat meningkatkan dukungan politik dan kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan, untuk keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pembahasan diatas, kesimpulan yang peneliti dapatkan mengenai Kolaborasi Modal Politik Pemerintah Kalurahan dan Modal Sosial Masyarakat dalam Pengembangan BUM Kal di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

1. Kolaborasi antara Pemerintah Kalurahan dan BUM Kal Gemilang Pemerintah Kalurahan dan BUM Kal Gemilang telah menjalin kolaborasi dalam bentuk dukungan finansial melalui penyertaan modal serta kebijakan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Penyertaan modal ini mencerminkan modal politik, di mana Pemerintah Kalurahan menyediakan dukungan finansial yang dibutuhkan untuk operasional BUM Kal. Namun, implementasi kebijakan ini belum efektif dalam mengoptimalkan operasional BUM Kal. Dukungan dari Pemerintah masih terbatas pada penyediaan kerangka regulasi tanpa adanya tindakan konkret yang berkelanjutan untuk mengaktifkan BUM Kal secara optimal.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan BUM Kal Gemilang Masyarakat Kalurahan Wiladeg menunjukkan partisipasi yang cukup baik dalam mendukung pengembangan BUM Kal Gemilang, terutama melalui pemberian ide dan gagasan mengenai jenis usaha

yang perlu dijalankan. Namun, ide-ide dari masyarakat ini belum diimplementasikan secara efektif karena kurangnya koordinasi dan kerja sama yang kuat dengan Pemerintah Kalurahan. Partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor pendukung utama dalam pengembangan BUM Kal Gemilang, namun diperlukan peningkatan kerja sama dan sinergi antara masyarakat dan Pemerintah Kalurahan untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi tindakan nyata.

3. Faktor utama yang mendukung pengembangan BUM Kal adalah partisipasi masyarakat yang aktif memberikan ide. Namun, ada beberapa hambatan, termasuk kurangnya kerja sama antara pemerintah dan pemangku kepentingan, serta kebijakan AD/ART yang belum efektif sehingga BUM Kal yang ada mengalami kevakuman dalam manajemen operasionalnya. Rencana Program Kerja (RPK) diharapkan menjadi panduan untuk mengatasi masalah ini dan memastikan operasional BUM Kal Gemilang. Keberhasilan pengembangan BUM Kal Gemilang bergantung pada kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah kalurahan, masyarakat, dan stakeholder, serta implementasi kebijakan yang efektif. Dukungan aktif pemerintah dalam bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan serta memanfaatkan ide masyarakat secara optimal sangat penting untuk mencapai pengembangan dan keberlanjutan BUM Kal.

B. SARAN

1. Pemerintah Kalurahan perlu mengoptimalkan kebijakan yang tertuang dalam AD/ART dengan tindakan nyata yang mendukung operasional BUM Kal. Selain penyediaan regulasi, Pemerintah Kalurahan harus memberikan pendampingan dan pelatihan teknis kepada pengurus BUM Kal untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif. Mengembangkan program pendukung, seperti insentif bagi pengusaha lokal atau kemitraan dengan pihak swasta, hal ini dapat membantu memperkuat dukungan pemerintah.
2. Pemerintah Kalurahan dan pengurus BUM Kal perlu mengadakan forum komunikasi rutin untuk menjaring dan mengimplementasikan ide-ide dari masyarakat. melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan operasional BUM Kal akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Selain itu, program edukasi dan sosialisasi mengenai peran BUM Kal dan manfaatnya bagi masyarakat dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif dan konstruktif.
3. Pemerintah Kalurahan perlu memperkuat kolaborasi dengan stakeholder dan masyarakat melalui penyusunan dan pelaksanaan program kerja yang komprehensif. Pemerintah juga harus aktif memberikan dukungan berupa sumber daya, pendampingan teknis, dan pengawasan yang berkelanjutan, serta mengadakan pelatihan dan penguatan kapasitas bagi pengurus BUM Kal dan masyarakat. Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan AD/ART juga diperlukan agar lebih efektif dalam

menggerakkan operasional BUM Kal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan BUM Kal Gemilang dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Feny, R., F. Wasil, M., Jumiyati, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., & Ambarwati, K. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In Rake Sarasin (Issue March). Surabaya: PT. Pustaka Pelajar. <https://scholar.google.com/citations>.
- Milles, Matthew B. and. Michael Huberman (2005). *Qualitative Data Analysis* (Terjemahan). Jakarta: UI Press.
- Saleh, C. (2020) Konsep, Pengertian, Dan Tujuan Kolaborasi. *Pustaka Universitas Terbuka 1*.
- Thomas, S. (2020). Memahami modal sosial. *Memahami Modal Sosial*.

Jurnal

- Aji, Nugraha, A. A., & Juhari, S. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Perkembangan Badan Usaha Milik Desa: Studi Terhadap Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 5(2), 1-13.
- Anggit, H. J., Nunik, R., & Turtino (2022) Analisis Peran Pemerintah Dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) De Bale Di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2), 405-444.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborativ Governance. (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo) 5-13.
- Creswell, J., W. (2014). Penelitian Kualitatif dan desain riset, memilih diantara lima pendekatan. *Yogyakarta:pustaka pelajar*.
- Denok Kurniasih, P. I. (2017). Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Di Kabupaten Banyumas). 3-7.
- Dewi, N.L.Y. (2019). Dinamika collaborative Governance dalam studi kebijakan publik. *Jurnal ilmah dinamika sosial*,3(2), 200-210.
- Dollu, E. B. S \$ Tokan, F. B. (2020). Modal Sosial: Studi tentang Kumpo Kampo sebagai Strategi Melestarikan Kohesivitas PadaMasyarakat

- Larantuka di Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Warta Governare Vol.1.No. 1. Januari-Juli 2020*, 1-14.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of public administration research and theory*, 22(1), 1-29.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 25-46.
- Juwita Hayyuning Prastiwi, I. F. (2022). Sospol: Jurnal Sosial Politik. *Dinamika Politik Dalam Pendirian Dan Pengelolaan BUM Desa: Studi Pada Tiga BUM Desa Terbaik Jawa Timur*, 83-95.
- Kadir, G. (2014). Pengertian Pembangunan Politik.
- Khairulyadi, K & Zulfadhl, Z. (2021). Modal Sosial dalam Pengelolaan BUMG di Gampong Trieng Gadeng Aceh Timur. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 2(2), 60-74.
- Legowo, M. & Diarti, A. M., (2020). Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan BUM Desa Se-Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. *Paradigma*, 9(1).
- Mbolang, A., Tokan, F. B., & Boro, V.I (2020). MODALITAS SOSIAL POLITIK: (Studi Kasus Kemenangan Ferdinandus Mazmur (FM) pada Pemilu Legislatif di Dapil V Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019). 186-198.
- Mia Hardiani, M. R. & Rifandi, M. (2023). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sidomoyo Kecamatan Godean, Di Yogyakarta. *Jurnal Maneksi* 213-221.
- Novitasari, A. D., Irianto, H., & Prasetyowati, T. (2022). Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Melalui Pengelolaan Produksi Ikan Bandeng Di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. *INTELEKTUAL (E-Journal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi)*, 9(2), 151-165.
- Raharjo, P. (2022). Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Tepus Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(11), 1011-1026.
- Rahmawati, S. (2020). Analisis pengelolaan badan usaha milik desa (bum desa) di kabupaten bandung barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(1), 1-13.

- Ramadana, C. B. (2015). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). 1073-1076.
- Retno, S., A. & Hardi, W. (2020). *Collaborative Governance* Dalam Perspektif Administrasi Publik.
- Rijali, A. 2018). Analisis data kualitatif. *Alhadhara:Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 84-95.
- Rosaliza, M. (2015). Waawancara, sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif. *Jurnal ilmu budaya*, 11(2), 71-79.
- Sastrawati, N. (2019). Partisipasi politik dalam konsepsi teori pilihan rasional James S Coleman. *Al-Risalah*, 19(2), 187-197.
- Sidik, H. (2020). Meningkatkan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sebagai Penggerak Ekonomi Pedesaan Di Desa Langensari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 21-30.
- Subhan, S. (2019). Governance: Perubahan Paradigma Pada Penyelenggaraan Pemerintahan. *SOSFILKOM*: jurnal sosial, filsafat dan komunikasi. 33-47.
- Syafar, M. (2017). Modal Sosial Komunitas Dalam Pembangunan Sosial. *Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam*, 3(1), 1-22).
- Tanujaya, C. (2017). Perancangan Standart Operational Procedure Produksi. *Performa: Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, 2(1), 90-95.
- Upadani, I. G. A. W. (2017). Model Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Mengelola Daerah Aliran Sungai (Das) Di Bali. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 1(1), 11-22.

Skripsi

- Janar, K. Y. T. (2023). *Kolaborasi Pemerintah Kalurahan Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Kebun Teh Nglinggo* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD") 4-140.
- Kurniawan, Y. F. (2022). Ambivalensi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata: Perspektif Governing (Studi di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta) (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "Apmd").
- Paskalis, S. D. (2022). Dinamika Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Kalurahan Bangunjiwa, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rahmadanti, S. (2023). *Peran Pemerintah Kalurahan Dalam Mengembangkan BUM Kal(Badan Usaha Milik Kalurahan) "Gerbang Merapi" Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman Tahun 2021-2022(Doctr\Oral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).*

Susana, S. (2022). *Pengelolaan Common Poll Resources: Mencari Titik Temu Antara Modal Sosial dan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Bambing Opak Asri (Doctoral dissertation).*

Perundang-Undangan

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Permendes PDTT No. 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Pemeringkatan, Pembinaan, dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk Pemerintahan Kalurahan

A. Identitas informan

Nama :

Umur :

Jenis kelamin :

Jabatan pekerjaan :

B. Daftar pertanyaan

1. Sejak kapan BUM Kal didirikan?
2. Bagaimana kontribusi Pemerintah Kalurahan dalam operasional BUM Kal?
3. Apakah kerja sama antara Pemerintah kalurahan Dengan Pihak-Pihak Terkait, seperti BPD, pengurus, dan masyarakat?
4. Bagaimana koordinasi antara Pemerintah Kalurahan dengan pengurus BUM Kal dan masyarakat terkait BUM Kal?
5. Apakah dalam operasional BUM Kal ada terjalin kerja sama dengan pihak lain seperti pihak swasta?
6. Bagaimana peran dari partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUM Kal?
7. Seberapa pentingkah partisipasi dari masyarakat untuk keberlanjutan operasional BUM Kal?
8. Apakah terdapat kebijakan atau regulasi khusus yang mengatur operasional BUM Kal?

9. Apakah terdapat penyertaan modal dari Pemerintah Kalurahan yang diperuntukkan BUM Kal?
10. Bagaimana tanggapan Pemerintah Kalurahan terhadap kritik dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat mengenai BUM Kal
11. Apa faktor-faktor utama yang mendorong pengembangan BUM Kal?
12. Apa saja kendala maupun hambatan dalam pengembangan BUM Kal?
13. Apakah pemerintah kalurahan memiliki strategi untuk menjaga kelangsungan pengembangan BUM Kal?

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk pengurus BUM Kal

A. Identitas informan

Nama :

Umur :

Jenis kelamin :

Jabatan :

B. Daftar pertanyaan

1. Sejak kapan BUM Kal berdiri?
2. Unit usaha apa saja yang dijalankan oleh BUM Kal untuk saat ini?
3. Apakah terdapat kebijakan khusus dalam operasional BUM Kal?
4. Apakah terdapat penyertaan modal dari Pemerintah Kalurahan yang diperuntukkan BUM Kal?
5. Dalam operasional BUM Kal apakah ada terjalin kerja sama dengan pihak lain seperti pihak swasta?
6. Apakah dalam pengembangan BUM Kal ada melibatkan masyarakat?
7. Seberapa pentingkah peran masyarakat mengenai pengembangan dan keberlanjutan BUM Kal?
8. Sudahkah pengurus BUM Kal pernah mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan BUM Kal?
9. Apakah ada faktor pendorong dalam mengembangkan BUM Kal?
10. Apakah ada faktor penghambat dalam pengembangan BUM Kal?
11. Apakah pengurus memiliki strategi dalam keberlanjutan dan mengembangkan BUM Kal?

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk Masyarakat

A. Identitas informan

Nama : _____

Umur : _____

Jenis kelamin : _____

Jabatan : _____

B. Daftar pertanyaan

1. Apakah bapak/Ibu mengetahui terkait adanya BUM Kal di Kalurahan Wiladeg?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui terkait pengadaan sosialisasi maupun pelatihan mengenai mengenai BUM Kal?
3. Apakah Pemerintah kalurahan dan pengurus ada melibatkan masyarakat dalam operasional BUM Kal?
4. Apakah bapak/Ibu merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan BUM Kal?
5. Bagaimana pandangan bapak/Ibu mengenai pendirian BUM Kal?
6. Apa harapan kedepanya bapak/Ibu untuk kalurahan dan khususnya BUM Kal?

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Lurah Kalurahan Wiladeg (Pak Kaniyo)



Wawancara bersama Carik Kalurahan Wiladeg (Ibu Nurtika Fitria Reni, ST)



Wawancara bersama Ketua Pengurus BUM Kal (Pak Mugiyono)



Wawancara bersama Ketua BPKal (Pak Tri Hardono)



Wawancara bersama masyarakat atau pelaku usaha (Ibu Runi)



Wawancara bersama masyarakat (Pak Sumarno)



Wawancara bersama masyarakat (Ibu Noviana)



Wawancara bersama masyarakat atau pelaku usaha (Ibu Emiliana)

Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi



Surat Tugas Penelitian



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA

Akreditasi Institusi B

- PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA PROGRAM DIPLOMA TIGA STATUS TERAKREDITASI: B
- PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI: B
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI: B

Alamat : Jalan Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 050/I/T/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Lisa Silvia
Nomor Mahasiswa : 20520046
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul
b. Sasaran : Kolaborasi Modal Politik Pemerintah kalurahan dengan Modal Sosial Masyarakat dalam Pengembangan BUMKal di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul
c. Waktu : 1 Februari 2024

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.



Yogyakarta, 26 Januari 2024

Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

Surat Permohonan Ijin Penelitian

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|--|--|
|  | <p>YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA Akreditasi Institusi B</p> <p>• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA PROGRAM DIPLOMA TIGA STATUS TERAKREDITASI B • PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B • PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B • PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI A • PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI IIAK SEKALU</p> <p>Alamat : Jalan Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id</p> | | | | | | |
| <p>Nomor : 094/I/U/2024 Hal : Permohonan ijin penelitian</p> | | | | | | | |
| <p>Kepada Yth : Lurah Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul Di Tempat</p> | | | | | | | |
| <p>Dengan hormat,</p> <p>Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 1 Februari 2024. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".</p> | | | | | | | |
| <p>Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :</p> <table><tr><td>Nama : Lisa Silvia</td></tr><tr><td>No Mhs : 20520046</td></tr><tr><td>Program Studi : Ilmu Pemerintahan</td></tr><tr><td>Judul Skripsi : Kolaborasi Modal Politik Pemerintah kalurahan dengan Modal Sosial Masyarakat dalam Pengembangan BUMKAL di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul</td></tr><tr><td>Tempat : Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul</td></tr><tr><td>Dosen Pembimbing : Utami Sulistiana, S.P., M.P</td></tr></table> | | Nama : Lisa Silvia | No Mhs : 20520046 | Program Studi : Ilmu Pemerintahan | Judul Skripsi : Kolaborasi Modal Politik Pemerintah kalurahan dengan Modal Sosial Masyarakat dalam Pengembangan BUMKAL di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul | Tempat : Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul | Dosen Pembimbing : Utami Sulistiana, S.P., M.P |
| Nama : Lisa Silvia | | | | | | | |
| No Mhs : 20520046 | | | | | | | |
| Program Studi : Ilmu Pemerintahan | | | | | | | |
| Judul Skripsi : Kolaborasi Modal Politik Pemerintah kalurahan dengan Modal Sosial Masyarakat dalam Pengembangan BUMKAL di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul | | | | | | | |
| Tempat : Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul | | | | | | | |
| Dosen Pembimbing : Utami Sulistiana, S.P., M.P | | | | | | | |
| <p>Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.</p> | | | | | | | |
| <p>Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapan terima kasih.</p> | | | | | | | |
| <p>Yogyakarta, 26 Januari 2024 Ketua YOGYAKARTA Dr. Sutoro Eko Yunanto NIY. 170 230 190</p>  | | | | | | | |